



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl Pemuda 35 (0292) 421034, FAX (0292) 421034

Purwodadi 57111



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No.35 Purwodadi (58111) Telp. (0292) 421034
Facimail. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor: 130/2675/A/2018

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB I nomor 1.3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama selanjutnya disebut Renstra Dinas Pendidikan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;

- KETIGA : Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 sebagaimana diktum kedua menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021;
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 meliputi:
1. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan
 2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, sumber daya Dinas Pendidikan, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan
 3. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis
 4. BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan
 5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator
 6. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Memuat indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
 7. BAB VII : PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Grobogan
Pada tanggal : 3 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd., MM
NIP. 19690415 199702 1 002

Tembusan dikirim kepada yth.

1. Bupati Grobogan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Grobogan
5. Arsip.

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak khususnya Tim Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dengan semua pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 ini merupakan Edisi Revisi pertama. Revisi dilakukan karena adanya perubahan sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan berubahnya kewenangan dan struktur pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Grobogan yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Pendidikan Nasional yaitu Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Goton Royong.

Kami sadar, peningkatan mutu pendidikan tidak akan dapat diwujudkan dengan baik tanpa didukung dengan perencanaan yang matang, karena itu kami memanfaatkan momentum penyusunan Renstra ini seoptimal mungkin agar Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan memiliki sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang matang yang dapat digunakan sebagai acuan di dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu adalah pekerjaan yang berat diperlukan tekad yang kuat disertai tindakan yang sungguh–sungguh oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan baik yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Satuan Pendidikan serta Pemangku Kepentingan Pendidikan (Stake Holder).

Keberhasilan dalam menyelesaikan dokumen Renstra ini tidak terlepas dari kerja keras anggota Tim Penyiapan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten

Grobogan beserta para pemangku kepentingan. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Tim Renstra dan para pemangku kepentingan yang dengan sungguh-sungguh bekerja keras menyusun perencanaan ini hingga selesai.

Akhirnya kami Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Grobogan, 3 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd., MM.
NIP 19690516 199703 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	5
C. Maksud Dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN	9
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.....	9
B. Struktur Organisasi	19
C. Tata Kerja	21
D. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.....	22
E. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	24
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.....	49
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	52
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	52
B. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
C. Telaah Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2014 – 2019	59
D. Telaah Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018	70
E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	76
F. Penentuan Isu-isu Strategis	85
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	88
A. Tujuan Strategis.....	88
B. Sasaran Strategis	89
B. Desain Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis	94
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	98
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	107
A. Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Program	107
B. Pendanaan Indikatif	119
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	139
A. Indikator Pencapaian Kinerja Kunci	139
B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja	143
 BAB VIII PENUTUP.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD Kabupaten/ Kota
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Gambar 3	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan dan Kab/Kota di Sekitarnya
Gambar 4	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan
Gambar 5	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan.....
Gambar 6	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan.....
Gambar 7	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan
Gambar 8:	Peta Kabupaten Grobogan
Gambar 9	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan
Gambar 10:	Komposisi Belanja Sektor Pendidikan dibandingkan dengan Sektor Lain Pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015
Gambar 11:	Komposisi Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015
Gambar 12:	Komposisi Belanja Sektor Pendidikan dibandingkan dengan Sektor Lain Pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Gambar 13:	Komposisi Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016
Gambar 14:	Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan merupakan unsur yang esensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Secara khusus ukuran kesejahteraan menempatkan pendidikan sebagai unsur penting dalam indikator keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Mendasarkan kepada hal tersebut, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui capaian salah satu indikator keberhasilan pembangunan tersebut.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumberdaya manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan juga berfokus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para

pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu diperlukan sistem perencanaan yang terstruktur dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga capaian cita-cita pendidikan yang makin bermartabat segera terwujud.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi sub urusan manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan serta bahasa dan sastra. Kewenangan yang dimiliki ini harus diwujudkan dan diterjemahkan dalam rencana yang lebih operasional baik dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek. Perencanaan pada tingkat kabupaten/kota dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan pada tingkat perangkat daerah yang bertanggungjawab atas urusan pendidikan dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Pasal 272 UU 23 tahun 2014 menyatakan bahwa (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat 1, menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pasal 272 UU 23 tahun 2014 pada ayat 2 bahwa Renstra tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2016 menyusun RPJMD tahun 2016-2021 sebagai implikasi dari pilkada tahun 2015-2016. RPJMD ini harus di

tindaklanjuti oleh perangkat daerah yaitu dengan menyusun Renstra Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pendidikan. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan data yang akurat dan terkini yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun 2016-2021.

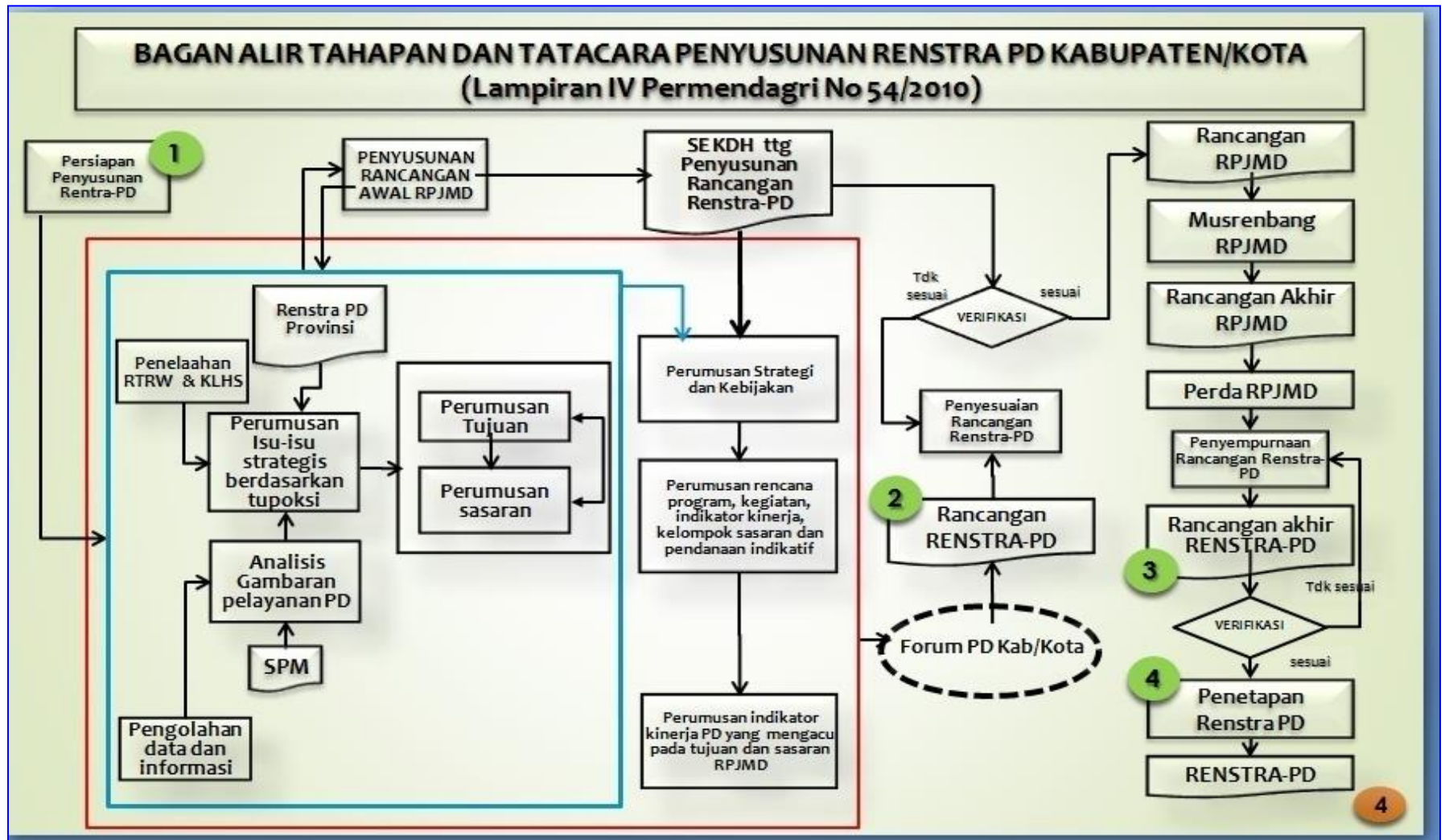
Fungsi Renstra Perangkat Daerah bidang Pendidikan Kabupaten Grobogan ini adalah mengarahkan kemana pelayanan Dinas Pendidikan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dengan proses sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

1. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah
3. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
4. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Proses tersebut dapat disimak pada bagan berikut:

Gambar1: BaganAlirTahapan danTatacaraPenyusunanRenstra PD Kabupaten/Kota



B. Landasan Hukum

Dasar hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

C. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksudmenjabarkan visi, misiBupati Grobogan kedalam perencanaan lima tahunanguna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan;
4. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

D. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Berdasarkan pada peraturan tersebut, maka sistematika Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra-OPD, maksud tujuan, dan sistematika penulisannya

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, sumber daya Dinas Pendidikan, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat fungsi dan peran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang pendidikan, serta memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis Dinas Pendidikan, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendidikan, serta pembina dan pelaksana tugas bidang pendidikan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan;
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD; dan
 - c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP; dan
 - c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP.
6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar (SD), pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:
 - 1). perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
 - 2). pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan;
 - 3). pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan;
 - 4). pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan;
 - 5). pengelolaan kesekretariatan dinas;
 - 6). pengelolaan UPT; dan
 - 7). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
- c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:
 - 1). penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
 - 2). penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - 3). penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
 - 4). pengelolaan sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
 - 5). pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
 - 6). penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
 - 7). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

- a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian dan pengelolaan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi Dinas.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, penge-lolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan.

5. Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, penge-lolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, surat-menyurat, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan.

6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelo-laan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:
 - 1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;

- 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
- 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
- 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
- 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal; dan
- 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan pendidikan non formal.

9. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pembinaan, pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

10. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- a. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:
 - 1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sekolah dasar;
 - 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar;

- 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar;
- 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar;
- 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar; dan
- 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pembinaan bahasa dan sastra daerah di Sekolah Dasar.

12. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

- a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

13. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

- a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan kelembagaan, sarana prasarana, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar;

14. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:
 - 1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

- 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kurikulum muatan local, penilaian dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama.

16. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

- a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

17. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

- a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama.

18. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pendidik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pengangkatan, penempatan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pencapaian standar nasional, kebutuhan dan pengelolaan, pemberhentian dan/atau pensiun pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan fungsi:
 - 1). menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

- 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman dan urusan kepegawaian lainnya kepada pendidik dan tenaga kependidikan;

20.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

21.Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja

- a. Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan penilaian kinerja.

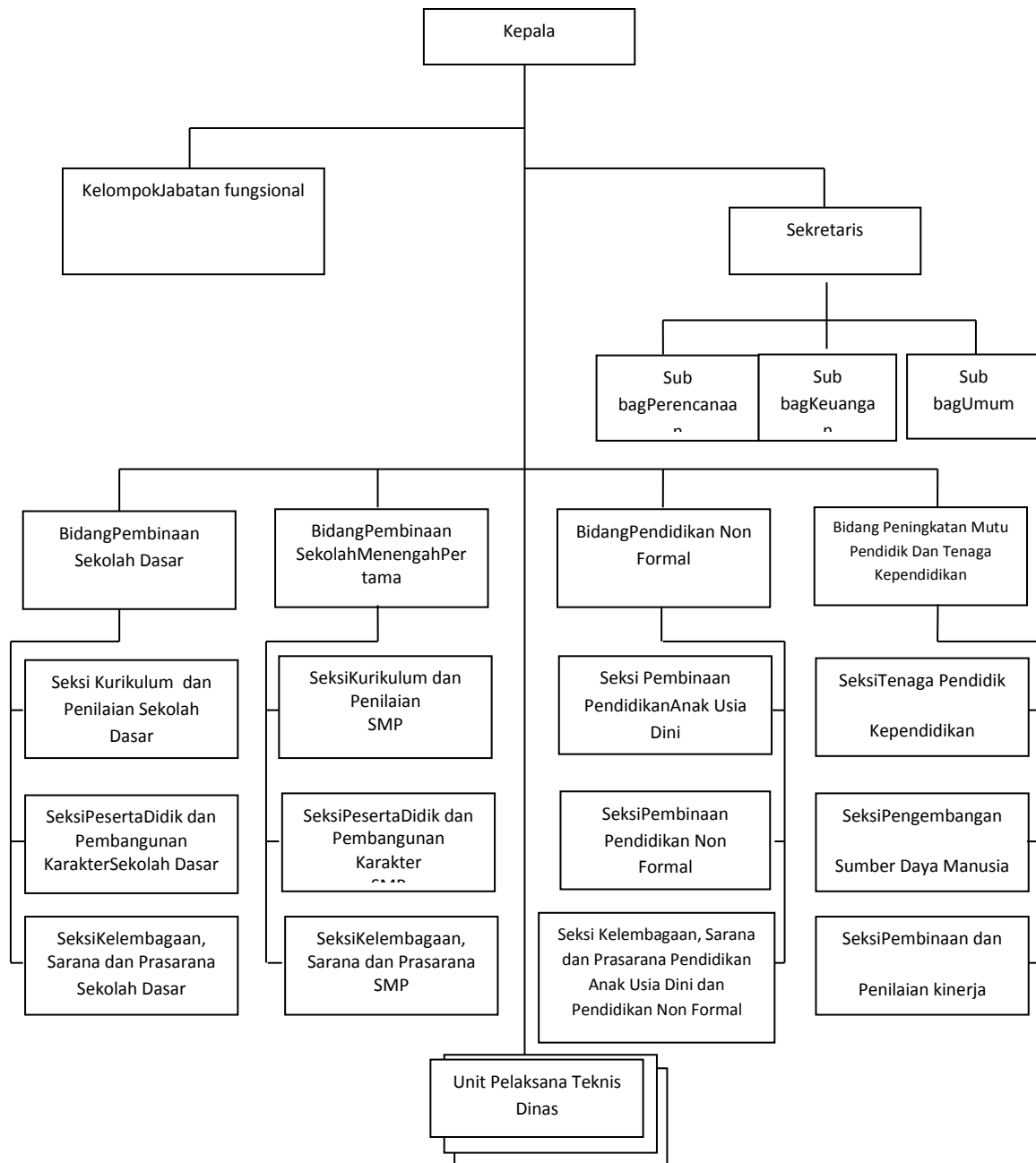
22.KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan perumpuan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilakukan oleh Instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Gambar 2 :Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan



C. TATA KERJA

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD,
3. Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
4. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.
7. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
8. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kepala Bidang di lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris.

10. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

D. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tercatat sejumlah 70 pegawai yang terdiri dari 11 orang ASN golongan IV, 41 orang ASN golongan III, 10 orang ASN golongan II dan 8 orang Non ASN dengan perincian sebagai berikut.

No	Penempatan	Tingkat Pendidikan								Jumlah	
		S2		S1		D3		SMA			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	3	1	3	2		2	6	5	12	10
2	Bidang Pembinaan SD	2		2	3			2	2	6	5
3	Bidang Pendidikan SMP	2	1	1	1			2	2	5	4
4	Bidang Peningkatan Mutu PTK	2		3	2		1	1	3	6	6
5	Bidang PAUD-PNFI	1		4	2			1		6	2
Jumlah		10	2	13	10		3	12	12	35	27

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2016

Tabel 1: Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan

Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan cukup baik, karena sebagaian besar berpendidikan S1 sebanyak 23 orang, tingkat pendidikan S-2 sebanyak 12 orang, D-3 sebanyak 3 orang dan SMU sebanyak 24 orang. Data tersebut menunjukan pegawai perempuan dengan pendidikan S-2 lebih rendah

dibandingkan pegawai laki-laki. Data ini mengarahkan penting peningkatan pendidikan S-2 bagi pegawai perempuan.

Ditinjau dari tingkat golongan distribusi pegawai berada antara golongan I sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai dijabarkan pada tabel 2.2 berikut.

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	8	3	11
2	Golongan III	22	19	41
3	Golongan II	6	4	10
4	Golongan I	0	0	0
5	Non ASN	5	3	8
	Jumlah	36	26	70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2016

Tabel 2: Jumlah ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Data tersebut menunjukkan aksesibilitas pegawai perempuan dalam mencapai golongan IV masih rendah. Tabel tersebut signifikan dengan pendidikan yang ditempuh perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

No	Jabatan	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala Dinas	1			1
2	Sekretaris	1			1
3	Kabid Pembinaan SD	1			1
4	Kabid Pembinaan SMP	1			1
5	Kabid Peningkatan Mutu PTK	1			1
6	Kabid PAUD-PNF	1			1
7	Kasubag Umum		1		1
8	Kasubag Perencanaan	1			1
9	Kasubag Keuangan		1		1
10	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	1			1
11	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	1			1
	Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD		1		
12	Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP	1			1

No	Jabatan	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
13	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP		1		1
14	Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP		1		1
15	Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan		1		1
16	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	1			1
17	Kasi Pembinaan dan Penilaian Kinerja		1		1
18	Kasi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini		1		1
19	Kasi Pembinaan Pendidikan Non Formal		1		1
20	Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD-PNF		1		1
21	Staf Sekretariat		8	6	14
22	Staf Bidang Pembinaan SD		5	1	6
23	Staf Bidang Pembinaan SMP		4	1	5
24	Staf Bidang Peningkatan Mutu PTK		4	3	7
25	Staf Bidang Pembinaan PAUD-PNF		3	1	4
	Jumlah	11	38	13	62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2016

Tabel 3: Sebaran ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecenderungan pemilik golongan IV adalah para pemegang jabatan struktural dari pimpinan Dinas hingga minimal kepala seksi.

2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang tersebar pada kantor induk Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Satuan Pendidikan.

E. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pem-

bangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan bertekad mewujudkan insan Grobogan yang berkarakter, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Berikut kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

1. Aspek Pelayanan Umum

a. Pendidikan Anak Usia Dini

a) Angka Partisipasi

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuhkembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang PAUD telah menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 38% pada tahun 2011 menjadi 61,51% pada tahun 2015.

Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	38	38,66	50,02	56,89	61,51

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 4: Angka Partisipasi PAUD

b) Jumlah Lembaga PAUD dan PAUD Terakreditasi

Saat ini jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Grobogan ada 1.045 lembaga, di dalamnya termasuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), dan Taman kanak-kanak (TK). Jumlah tersebut sejak tahun 2014 mengalami penurunan, sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

Jenis	Kondisi Tahun		
	2014	2015	2016
Kelompok Bermain	384	384	233
Tempat Penitipan Anak	10	10	6
Satuan Paud Sejenis	113	113	73
Taman kanak-kanak	746	736	728

Tabel 5: Jumlah Lembaga PAUD

PAUD saat ini tidak hanya ada diwilayah perkotaan, tetapi saat ini sudah banyak didirikan desa-desa melalui pos PAUD. Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD, pemerintah melakukan penilaian secara kelembagaan melalui sistem akreditasi. Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan programprogramnya. PAUD terakreditasi di Kabupaten Grobogan saat ini baru mencapai 5,08%, atau kondisinya sama dari tahun 2011-2015. Dalam rangka pencapaian PAUD terakreditasi, diperlukan upaya-upaya lebih optimal lagi agar pelayanan PAUD semakin baik.

Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Persentasi PAUD terakreditasi	%	-	-	-	-	5,08
	lembaga					50

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 6: Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

a) Penduduk Melek Huruf

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. 2.13 di bawah, di Kabupaten Grobogan saat ini penduduk usia >15 tahun melek huruf 91,87%, lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 90,41%. Namun dilihat dari kinerja selama periode lima tahun tersebut, menunjukkan kinerja yang relatif kecil.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	90,41	90,94	91,78	91,82	91,87

Tabel 7: Penduduk Melek Huruf

b) Lembaga Kursus

Sementara itu pendidikan non formal yang ada saat ini di Kabupaten Grobogan berupa lembaga kursus berjumlah 42 buah, yang memiliki ijin pada tahun 2015 baru sebesar 25% (11 buah). Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2014 berjumlah 42 buah, yang sudah berijin 45% (19 buah). Pada tahun 2016 berjumlah 30 buah, yang sudah berijin....%. Perkembangan lembaga kursus dapat dilihat pada Tabel 11. Sebagian besar lembaga kursus yang belum memiliki ijin ditengarai baru terdaftar saja namun perijinan resminya belum diselesaikan.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	%	32	45	45	25	
		lembaga	13	19	19	11	

Tabel 8: Lembaga kursus

c) Pusat Kegiatan Belajar

Sementara itu pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran sudah sangat baik. Tahun 2016 pusat kegiatan masyarakat berjumlah 24 buah. Tahun 2015 berjumlah 37 buah, dan Tahun 2014, berjumlah 37 buah. Hal ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam Tabel 12. Namun secara sarana dan prasarana telah 100% terpenuhi

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2014	2015	2016
1	Pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	%	75	100	100

Tabel 9: Pusat kegiatan Belajar Masyarakat

d) Kesetaraan

Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan paket, terutama pada Paket B dan Paket C, terdiri dari warga yang tidak lulus ujian nasional, dan sebagian kecil warga yang memang sejak semula tidak bersekolah di jenjang SMP-MTs, dan SMA-MA. Mereka ditampung pada lembaga-lembaga kesetaraan yang telah mencukupi di Kabupaten Grobogan. Gambaran tentang jumlah warga yang mengikuti program kesetaraan dan jumlah lembaga kesetaraan, dapat dilihat pada Tabel 13. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting sebagai alternative untuk memenuhi kepentingan bagi peminat sertifikasi pendidikan yang tidak bisa diperoleh di lembaga pendidikan formal, karena sebab tertentu.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2014	2015	2016
1	Warga Belajar Paket A		126	126	44
2	Warga Belajar Paket B		625	625	298
3	Warga Belajar Paket C		1.008	1.008	561
2	Jumlah Lembaga	Buah	56	56	33

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 10: Penduduk Mengikuti Pendidikan PAKET A/B/C dan Jumlah Lembaga

c. Pendidikan Dasar 9 Tahun

a) Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan dasar 9 tahun merupakan wajib belajar bagi masyarakat melalui program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu selama 9 tahun. Pendidikan wajib 9 tahun ini untuk mendorong pada pencapaian pemerataan pendidikan minimal setara SMP/MTs. Di Kabupaten Grobogan angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar sudah mencapai 96,74% ditahun 2015. Tren partisipasi sekolah pada pendidikan dasar menunjukkan kinerja meningkat dari tahun 2011-2015. Kenaikan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari meningkatnya kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) ditingkat SD/MI dan SMP/MTs. Untuk APK SD/MI, ditahun 2015 sudah mampu mencapai 106,65% menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 dan 2014. Walaupun dari sisi APK SD/MI menurun, namun dari sisi APM SD/MI menunjukkan peningkatan dari 89,35% ditahun 2011 menjadi 97,69% ditahun 2015. Kenaikan partisipasi sekolah ditingkat SD/MI juga ditunjang dengan meningkatnya angka kelulusan siswa dan menurunnya angka putus sekolah ditingkat SD/MI. Tren meningkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dipengaruhi juga oleh prestasi pendidikan ditingkat SMP/MTs. APK SMP/MTs trennya menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar 94,35% menjadi sebesar 100,03 % pada tahun 2015. Kinerja APK SMP/MTs menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dilihat pada pencapaian APM SMP/MTs, trennya juga meningkat setiap tahunnya, sama dengan APK SMP/MTs yang

meningkat. Gambaran tentang Angka Partisipasi Sekolah dapat dilihat pada Tabel 14.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	%	81,08	82,26	93,10	94,31	96,74
2	APK SD/MI/Paket A /SDLB	%	102,56	103,08	115,41	112,06	106,65
3	APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	94,35	97,60	99,46	101,28	100,03
4	APM SD/MI/Paket A/SDLB	%	89,35	95,09	95,15	96,56	97,69
5	APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	73,31	80,74	84,05	86,87	87,06

Tabel 11: Angka Partisipasi Sekolah

b) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Grobogan yang semakin menurun memberikan kontribusi pada kenaikan angka partisipasi sekolah. Angka putus sekolah menjadi salah satu indikator bagi peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing. Untuk jenjang SD-MI, APS relatif rendah, jauh dari angka 1 persen Sedangkan untuk SMP-MTs relatif lebih tinggi, yang mendekati angka 1 persen. Oleh karena itu, betapapun kecilnya prosentasi APS, tetap harus diminimalisir. Untuk melihat gambaran APS, dapat dilihat pada Tabel 15.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,06	0,06	0,03	0,05	0,03
		angka	43	68	43	51	43
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,37	0,25	0,20	0,59	0,61
		angka	129	212	144	402	402

Tabel 12: Angka Putus Sekolah

c) Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan murid SD/MI di kabupaten Grobogan pada tahun 2011-2015 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16, sebesar 100%. Untuk SMP-MTs, hanya pada Tahun 2011 sebesar 98,52%. Hal ini merupakan indikasi bahwa Kabupaten Grobogan melalui jalur pendidikan formal sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100
		angka	22.594	24.085	21.922	23.166	22.974
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	98,52	100	100	100	100
		angka	12.431	14.982	15.393	16.513	20.448

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 13: Angka Kelulusan

d) Rata-rata Nilai Ujian

Rata-rata nilai ujian nasional (UN) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 6,25 pada tahun 2011 menjadi 7,05 pada tahun 2015. Sedang untuk SMP-MTs cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2013, dari 73,04 menjadi 6,63, sebagaimana terlihat pada Tabel 17. Namun demikian, masih ada kesenjangan rata-rata nilai UN antar sekolah. masih cukup tinggi.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswaSD/MI		6,25	6,25	6,35	6,80	7,05
2	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswaSMP/MTs		6,54	6,54	7,34	6,63	6,63

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 14: Nilai Rata-rata Ujian Nasional

e) Angka Melanjutkan

Peningkatan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar juga tidak terlepas dari meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dengan kondisi ditahun 2015 mencapai sebesar 97,83%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA.MA, dan SMK juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 72,78%. Angka melanjutkan sangat dipengaruhi oleh kemungkinan banyaknya lulusan sekolah di Kabupaten Grobogan ke sekolah kabupaten lain, terutama

untuk yang melanjutkan dari SMP-MTs ke SMA-MA, dan SMK. Gambaran angka melanjutkan dapat dilihat pada Tabel 18.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	92,08	94,86	95,57	96,39	97,83
		angka	20.804	22.847	20.995	22.330	22.449
2	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	56,93	60	68,21	72,75	72,78

Tabel 15: Angka Melanjutkan

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar

a) Ketersediaan Ruang Kelas

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pada pendidikan dasar, ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Grobogan sudah mencukupi dengan kondisi kinerja 100%. Namun yang masih menjadi perhatian serius adalah pada kondisi sarana daiaan n prasarana pendidikan SD/MI. Tahun 2016, ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik hanya sebesar 63,72%, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk ruang kelas SMP/MTs kondisi baik masih kurang dibandingkan SD/MI dengan capaian 35,90%, mangalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Ruang kelas rusak ringan masih layak untuk digunakan, dengan catatan kerusakan tersebut harus segera diperbaiki, agar tidak menjadi semakin parah, agara kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung secara optimal. Kondisi perkembangan ketesediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 19.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	48,18	32,71	57.20	60.41	63.72
		ruang	2.537	3,208	3,183	3,190	3,483
2	Ruang kelas SD/MI kondisi rusak ringan	%	24,14	61,11	34.87	35.80	20.42
		ruang	1.272	1,313	1,110	1,142	1,116

3	Ruang kelas SD/MI kondisi rusak berat	%	27.67	23,32	22.86	17.97	15.86
		ruang	1.457	1,375	1,272	949	867
4	Ruang kelas SMP/MTs kondisibaik	%	79.33	32.71	38.54	64.03	35.90
		ruang	1.608	852	777	1,383	775
5	Ruang kelas SMP/MTs kondisi kondisi rusak ringan	%	18.16	61.11	51.24	19.63	56.74
		ruang	292	1,592	1,033	424	1,225
6	Ruang kelas SMP/MTs kondisi kondisi rusak berat	%	43.49	6.18	10.22	16.34	7.36
		ruang	127	161	206	353	159

Tabel 16: Ketersediaan Ruang Kelas

b) Ketersediaan Perpustakaan

Di Kabupaten Grobogan, SD-MI yang memiliki perpustakaan masih sangat rendah. Saat ini SD-MI yang mempunyai perpustakaan baru 554 sekolah dari 898 SD-MI atau baru 61,69%. Dari jumlah tersebut kondisinya adalah; 484 (87,36) dalam keadaan baik, dan 70 (12,64%) ruang dalam keadaan rusak. Dengan demikian masih ada 344 (38,31%) SD-MI yang memerlukan ruang perpustakaan. Sedangkan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standart baru mencapai 163 (70,87%) sekolah. dengan kondisi baik 78 (47,85%), dan dengan kondisi rusak 85 (52,15%) dengan demikian, masih ada 67 (29,13%) SMP/MTs yang memerlukan ruang perpustakaan yang layak. Kondisi Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 20.

Jenjang	Kondisi				Jumlah		Kebutuhan		Kekurangan	
	Baik		Rusak							
SD - MI	484	87.36%	70	12.64%	554	61.69%	898	100%	344	38,31%
SMP-MTs	78	47,85%	85	52,15%	163	70,87%	230	100%	67	29,13%

Sumber: Data dinas Pendidikan Kab. Grobogan 2017

Tabel 17: Ketersediaan Perpustakaan

c) Ketersediaan Laboratorium IPA

Selama ini, laboratorium IPA baru ada di jenjang SMP-MTs. Dari jumlah SMP-MTs, baru 106 (46,09%) sekolah yang sudah mempunyai ruang laboratorium IPA, dengan kondisi baik ada 41 (38,68%) ruang, dan dalam kondisi rusak ada 65 (61,32%) ruang. Dengan demikian masih ada 124 (53,91%) sekolah yang memerlukan ruang laboratorium. Untuk jenjang SD-

MI, walaupun pada umum-nya belum merasa memerlukan laboratorium, ada 8 sekolah yang sudah mempunyai laboratorium IPA, dengan kondisi baik 3 (37,5%) ruang, dengan kondisi rusak 5 (62,5%) ruang. Jumlah ini sangat rendah, yaitu hanya 0,89% apabila dibandingkan jumlah SD-MI yang ada. Ketersediaan dan kondisi laboratorium IPA bisa dilihat pada Tabel 21.

Jenjang	Kondisi				Jumlah		Kebutuhan		Kekurangan	
	Baik		Rusak							
SD - MI	3	37,5%	5	62,5%	8	0	898	0	890	99,11%
SMP-MTs	41	38.68%	65	61.32%	106	46.09%	230	100%	124	53.91%

Sumber: data Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016

Tabel 18: Ketersediaan Laboratorium IPA

d) Ruang Komputer

Komputer adalah perangkat yang semakin mendesak agar tugas-tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Saat ini hampir semua siswa sudah tidak asing lagi dengan peralatan tersebut. Namun demikian, ketersediaan ruang computer, baik di SD-MI maupun di SMP-MTs masih sangat rendah. Di SD MI, dari 898 sekolah baru 76 (8,46%) sekolah yang sudah mempunyai ruang computer dengan kondisi baik ada 61 (80,26%) ruang, dan dengan kondisi rusak ada 15 (19,74%) ruang. Dengan demikian masih ada 822 (91,54%) sekolah yang memerlukan ruang komputer. Di SMP-MTs baru 94 (40,87%) sekolah yang mempunyai ruang komputer, dengan kondisi baik ada 38 (40,43%) ruang, dan kondisi rusak ada 56 (59,57%) ruang. Dengan demikian, masih ada 136 (59,13%) sekolah yang memerlukan ruang komputer. Ketersediaan dan kondisi ruang komputer, dapat dilihat pada Tabel 22.

Jenjang	Kondisi				Jumlah		Kebutuha n		Kekurangan	
	Baik		Rusak							
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
SD - MI	61	80.26	15	19.74	76	8.46	898	100	822	91.54
SMP-MTs	38	40.43	56	59.57	94	40.87	230	100	136	59.13

Sumber: data Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016

Tabel 19: Ketersediaan Ruang Komputer

e) Ketersediaan Tempat Olahraga

Olahraga merupakan salah satu ajang untuk membina potensi dan bakat siswa. Karena itu prasarana olahraga harus tersedia di setiap sekolah. Ketersediaan tempat olahraga di Kabupaten Grobogan untuk SD-MI belum mencukupi kebutuhan. Dari 898 sekolah, baru ada 319 (35,52%) sekolah yang mempunyai tempat olahraga, dengan kondisi 239 (74,92) tempat dalam kondisi baik, dan 80 (25,08%) tempat dalam kondisi rusak. Dengan demikian masih ada kebutuhan tempat olahraga di 579 (64,48%) sekolah. Di SMP-MTs kebutuhan tempat olahraga telah mencukupi. Ketersediaan dan kebutuhan, serta kondisi tempat olahraga dapat dilihat pada Tabel 23.

Jenjang	Kondisi				Jumlah		Kebutuhan		Kekurangan	
	Baik		Rusak							
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
SD - MI	239	74.92	80	25.08	319	35.52	898	100	579	64.48
SMP-MTs	123	100	0	0	123	100	230	100	0	0

Sumber: data Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016

Tabel 20: Ketersediaan Lapangan Olahraga

f) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada prinsipnya MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Di Kabupaten Grobogan, dalam rangka meningkatkan keberdayaan sekolah, saat ini semua tingkatan baik SD/MI, SMP/MTs, sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik. Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan dengan baik. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun
----	-----------	--------	---------------

			2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	85,12	85,54	88,56	97,19	98,51

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 21: Prosentase Sekolah yang melaksanakan MBS

3. Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Kualifikasi Pendidik

Salah satu indikator guru yang professional adalah guru yang memiliki kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan, minimal S1. Di Kabupaten Grobogan, guru yang sudah berkualifikasi S1/D-IV sebagai berikut: Guru TK-RA-PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.121 (47,60%). Guru SD-MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 6.017 (88%). Guru SMP-MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 3.341(85,10%). Sementara itu, masih ada guru-guru yang masih berijazah di bawah S-1, di bawah SLTA, mereka adalah; guru TK-RA-PAUD 1.224 (52,02%), Guru SD-MI 772 (11,12%). Guru SMP-MTs sebanyak 357 (9,09%). Dengan kondisi tersebut, berarti masih ada kewajiban pemerintah untuk mendorong pencapaian kualifikasi S-1/D-4 bagi guru-guru tersebut. Kualifikasi dan Kebutuhan guru, dapat dilihat pada Tabel 25 dan Tabel 26.

Jenjang	Kualifikasi/Ijazah														Jumlah
	<SLTA		SLTA		D1		D2		D3		S-1		S-2		
TK-RA-PAUD	489	18.7%	440	18.7%	1	0.04%	278	11.8%	16	0.68%	1121	47.6%	8	0.34%	2353
SD- MI	47	0.68%	505	7.28%	6	0.09%	174	2.51%	40	0.58%	6107	88.0%	62	0.89%	6941
SMP MTs			223	5.68%	43	1.09%	41	1.04%	50	1.27%	3341	85.1%	230	5.86%	3928

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 22: Kualifikasi Pendidik

Jenjang	Belum S-1		S-1		Kebutuhan S-1	Kekurangan S-1
TK-RA-PAUD	1.224	52,01%	1.121	47,60%	1.232	52,01%
SD- MI	772	11,12%	6107	88,00%	7.72	11,12%
SMP	357	9,09%	3.341	85,10%	357	9,09%

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 23: Kebutuhan Kualifikasi Pendidik S-1/D-4

b) Kebutuhan Guru Kelas PNS

Kebutuhan guru kelas PNS di Sekolah Dasar Kabupaten Grobogan sebanyak 4.859 orang. Sementara ini jumlah guru kelas PNS yang tersedia sebanyak 2.409 orang (49,58%). Dengan demikian masih ada kekurangan guru kelas PNS sebanyak 2.450 orang (50,42%). Ketersediaan dan kekurangan guru PNS dapat dilihat pada Tabel di bawah. Atas kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten tidak memperoleh kuota pengangkatan guru PNS, karena belanja tidak langsung (gaji pegawai) di Kabupaten Grobogan telah melebihi 50% dari total.

Kekurangan guru kelas tersebut harus dipenuhi agar proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung dengan mengoptimalkan peran guru non PNS. Saat ini jumlah guru non PNS di Kabupaten Grobogan sebanyak 3183 orang, jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kekurangan guru kelas tersebut, walaupun masih harus dilihat mengenai kesesuaian ijasahnya.

Kecamatan	Kebutuhan Guru Kelas PNS	Jml Guru. Kelas PNS	Kekurangan Guru Kelas PNS
Kedungjati	171	80	-91
Geyer	367	144	-223
Brati	210	111	-99
Klambu	392	173	-219
Tanggunharjo	265	158	-107
Karangrayung	352	124	-228
Pulokulon	270	115	-155
Godong	221	123	-98
Toroh	229	75	-154
Grobogan	295	162	-133
Kradenan	176	97	-79
Tawangharjo	257	123	-134
Wirosari	418	240	-178
Tegowanu	179	102	-77
Gabus	157	79	-78
Ngaringan	296	155	-141
Gubug	258	150	-108

Kecamatan	Kebutuhan Guru Kelas PNS	Jml Guru. Kelas PNS	Kekurangan Guru Kelas PNS
Purwodadi	187	116	-71
Penawangan	159	82	-77
	4,859	2,409	-2,450

Tabel 24: Kebutuhan Guru kelas PNS

c) Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam PNS

Kebutuhan guru Agama Islam (PAI) PNS untk SD-MI di Kabupaten Grobogan sebanyak 810 orang. Sedangkan guru yang masih aktif hanya 253 orang (31,32%). Dengan demikian ada kekurangan sebanyak 557 orang (68,77%), sebuah kekurangan yang cukup besar, mendesak untuk segera dipenuhi. Hal ini akan terasa semakin penting apabila dikaitkan dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang berbunyi; “Kemudahan memperoleh akses pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan insan yang berkarakter budi pekerti luhur, dan berdaya saing”. Untuk memenuhi kekurangan itu, sekolah memanfaatkan guru non PNS karena proses belajar mengajar harus tetap berlangsung walaupun kekurangan guru PNS. Berikut tabel distribusi kekurangan guru PNS PAI di sekolah dasar:

Kecamatan	Jumlah Guru. PAI PNS	Kebutuhan Guru PAI PNS	Kekurangan Guru PAI PNS
Kedungjati	8	29	-21
Karangrayung	11	61	-50
Penawangan	8	35	-27
Toroh	16	65	-49
Geyer	13	44	-31
Pulokulon	13	59	-46
Kradenan	17	45	-28
Gabus	10	37	-27
Ngaringan	7	38	-31
Wirosari	14	49	-35
Tawangharjo	5	29	-24
Grobogan	13	43	-30
Purwodadi	33	70	-37
Brati	8	30	-22
Klambu	14	26	-12
Godong	21	49	-28

Kecamatan	Jumlah Guru. PAI PNS	Kebutuhan Guru PAI PNS	Kekurangan Guru PAI PNS
Gubug	18	43	-25
Tegowanu	15	31	-16
Tanggunharjo	9	27	-18
	253	810	-557

Tabel 25: Distribusi guru PNS PAI

d) Kebutuhan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) PNS

Kebutuhan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) PNS sebanyak 810 orang. Jumlah guru yang tersedia sebanyak 308 orang (38,03%). Dengan demikian ada kekurangan sebanyak 502 orang (61,97%). Karena belum bisa merekrut pegawai baru, maka salah satu solusinya adalah dengan memberikan tugas tambahan kepada guru Penjaskes yang ada untuk merangkap di sekolah lain. Apabila dilihat jumlah guru Penjaskes dan sekolah, diperoleh rasio 1 guru/1,6 sekolah. Dengan demikian guru yang bersangkutan akan mempunyai kelebihan jam mengajar 14,64. Sehingga dengan demikian perlu dipikirkan konsekuensi dari kelebihan jam mengajar tersebut, walaupun sebenarnya apabila ada kelebihan jam mengajar, sebagai guru PNS tidak harus ada tuntutan tertentu kepada Dinas Pendidikan.

Kecamatan	Jumlah Guru Penjas PNS	Kebutuhan Guru Penjas PNS	Kekurangan Guru Penjas PNS
Kedungjati	6	29	-23
Karangrayung	16	61	-45
Penawangan	15	35	-20
Toroh	16	65	-49
Geyer	23	44	-21
Pulokulon	9	59	-50
Kradenan	18	45	-27
Gabus	23	37	-14
Ngaringan	9	38	-29
Wirosari	8	49	-41
Tawangharjo	10	29	-19
Grobogan	15	43	-28
Purwodadi	30	70	-40
Brati	16	30	-14
Klambu	17	26	-9
Godong	17	49	-32
Gubug	24	43	-19

Kecamatan	Jumlah Guru Penjas PNS	Kebutuhan Guru Penjas PNS	Kekurangan Guru Penjas PNS
Tegowanu	19	31	-12
Tanggunharjo	17	27	-10
	308	810	-502

Tabel 26: Kebutuhan Guru Pendidikan Jasmani

e) Rasio Siswa dan Guru

Rasio jumlah guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dibandingkan dengan jumlah guru. Melihat rasio siswa/guru sebagaimana tercantum pada table dan grafik di atas, apabila berdasarkan jumlah keseluruhan guru, baik guru PNS maupun non PNS sebenarnya sudah mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan, apabila mengacu kepada batas minimal jumlah siswa per rombel hanya 20 orang. Karena rata-rata rasio guru dibanding jumlah siswa hanya 1/18,1. Persoalannya adalah antara lain persebaran guru yang kurang merata. Pada tabel dan grafik di atas ternyata hanya sekolah-sekolah di 3 kecamatan yang memenuhi batas minimal jumlah siswa per rombel. Sementara sekolah-sekolah di 16 kecamatan kurang memenuhi batas jumlah minimal. Apabila dilihat kembali rasio siswa per rombel sebagaimana pada table 1, berarti kelebihan guru ini memang tidak bisa dipungkiri lagi. Hal ini apabila terus dibiarkan, akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Grobogan. Salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah dengan kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Kecamatan	Jumlah Siswa SDN	Jumlah Guru	Rasio Siswa Guru
Kedungjati	3549	226	15.7
Karangrayung	8789	493	17.8
Penawangan	6383	291	21.9
Toroh	9758	520	18.8
Geyer	5615	383	14.7
Pulokulon	8445	452	18.7
Kradenan	7068	401	17.6
Gabus	6262	381	16.4
Ngaringan	6501	305	21.3
Wirosari	7819	399	19.6
Tawangharjo	4624	255	18.1
Grobogan	6638	359	18.5

Kecamatan	Jumlah Siswa SDN	Jumlah Guru	Rasio Siswa Guru
Purwodadi	12125	680	17.8
Brati	3962	235	16.9
Klambu	3518	221	15.9
Godong	7230	420	17.2
Gubug	7403	360	20.6
Tegowanu	5198	264	19.7
Tanggungharjo	3711	222	16.7
	12, 4598	6,867	18.1

Tabel 27: Rasio Guru Siswa

f) Rasio Siswa per Rombel

Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat efisiensi setiap rombongan belajar. Berdasarkan tabel di bawah, rata-rata rasio siswa per rombel tingkat sekolah dasar cukup ideal, yaitu 1 rombel = 25,6 anak. Rasio siswa rombel yang tertinggi di kecamatan Penawangan, dengan rasio siswa per rombel 30,4 anak, terendah di kecamatan Kedungjati dengan rasio siswa per rombel 20,8 anak.

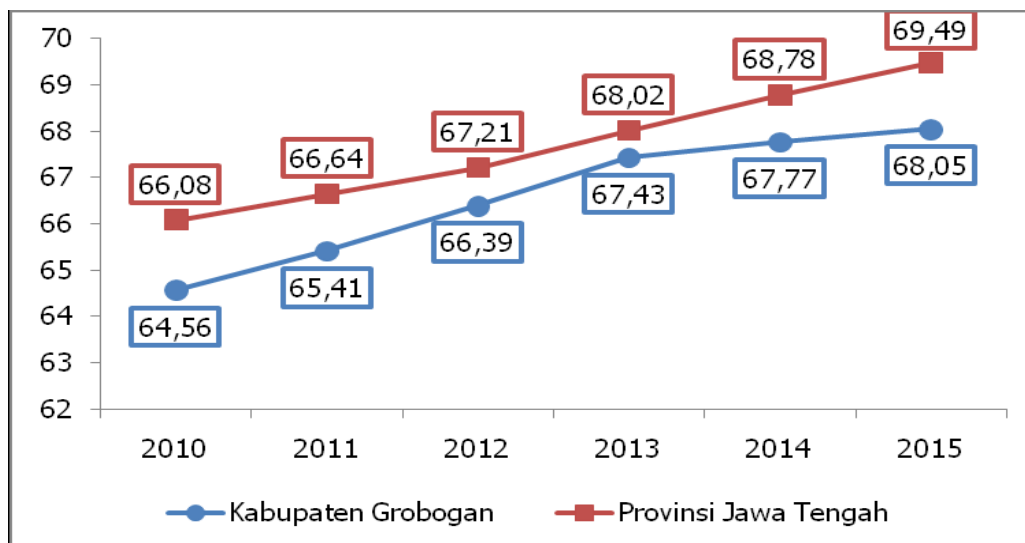
Kecamatan	Jumlah SDN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Rasio Siswa per Rombel
Kedungjati	29	171	3549	20,8
Karangrayung	61	367	8789	23,9
Penawangan	35	210	6383	30,4
Toroh	62	392	9758	24,9
Geyer	44	265	5615	21,2
Pulokulon	56	352	8445	24,0
Kradenan	45	270	7068	26,2
Gabus	43	221	6262	28,3
Ngaringan	37	229	6501	28,4
Wirosari	48	295	7819	26,5
Tawangharjo	29	176	4624	26,3
Grobogan	42	257	6638	25,8
Purwodadi	61	418	12125	29,0
Brati	30	179	3962	22,1
Klambu	26	157	3518	22,4
Godong	44	296	7230	24,4
Gubug	43	258	7403	28,7
Tegowanu	31	187	5198	27,8
Tanggungharjo	26	159	3711	23,3
Jumlah	792	4859	124598	25,6

Tabel 28: Rasio Siswa Rombel

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, sedangkan indikator dari bidang pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM di Kabupaten Grobogan dalam periode 2011-2014 trennya menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 IPM Kabupaten Grobogan sebesar 64,56, meningkat menjadi 68,5 pada tahun 2015. Kinerja perkembangan IPM Kabupaten Grobogan sejalan dengan peningkatan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 66,08 ditahun 2010 menjadi 69,49 pada tahun 2015. Akan tetapi, ditahun 2014 perkembangan IPM Kabupaten Grobogan sedikit melambat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2015

Gambar 3: Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan dan Kab/Kota di Sekitarnya

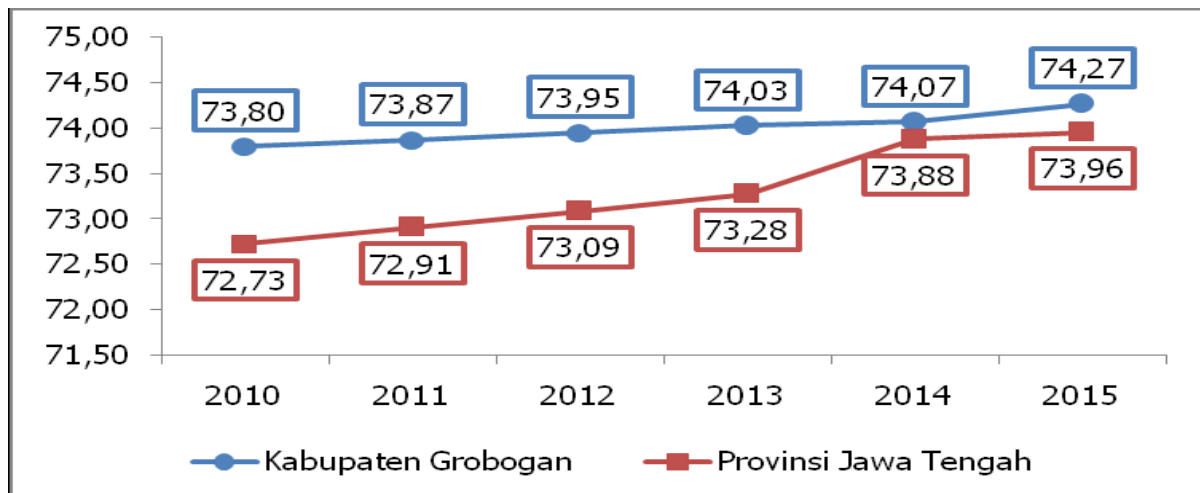
Indikator yang menjadi pembentuk IPM Kabupaten Grobogan yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita akan diuraikan di bawah ini.

b. Angka Harapan Hidup (AHH)

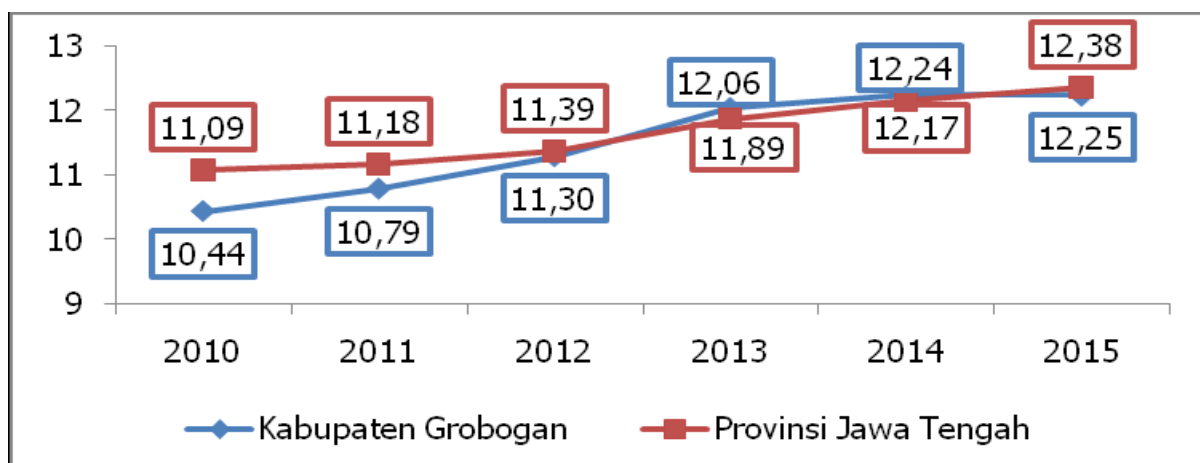
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015) menunjukkan peningkatan. Capaian selama

lima tahun meningkat dari 73,80 tahun pada tahun 2010 menjadi 74,27 tahun pada tahun 2015. AHH di Kabupaten Grobogan setiap tahun capaiannya selalu berada di atas

capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan

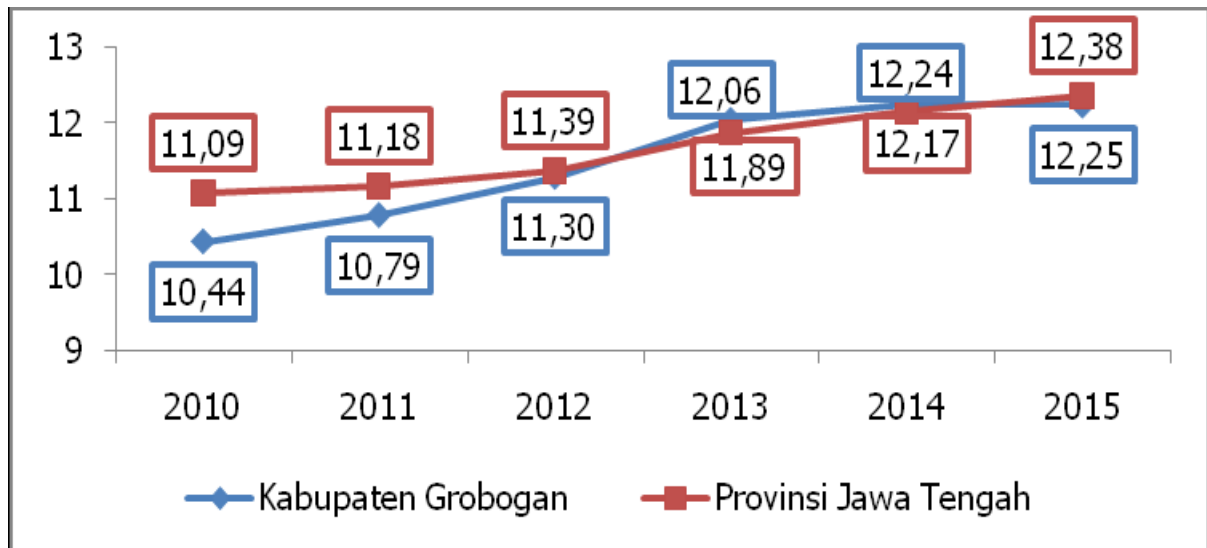


Gambar 5: Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, capaian angka HLS adalah 10,44 tahun kemudian meningkat menjadi 12,25 tahun pada tahun 2015. Jika pada tahun 2010 sampai 2012 capaian HLS Kabupaten Grobogan selalu di bawah capaian rata-rata Jawa Tengah, namun pada tahun 2013 dan 2014 angkanya menjadi lebih baik dengan berada di atas capaian rata-rata Jawa Tengah. Namun kinerja harapan lama

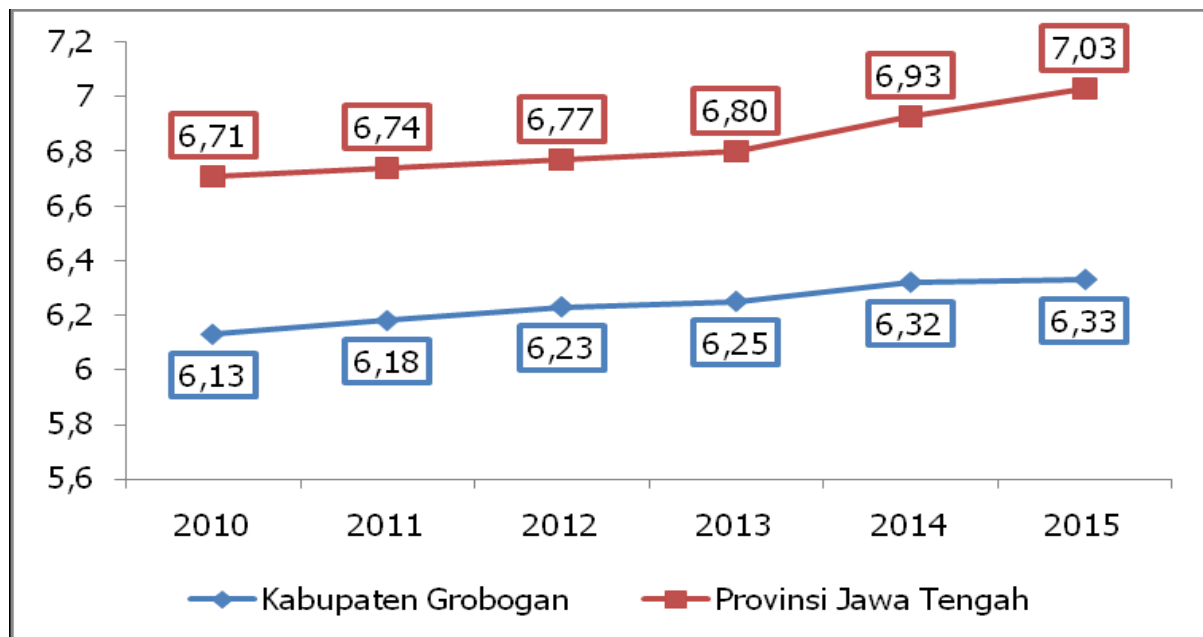
sekolah pada tahun 2015 kembali berada di bawah rata-rata Jawa Tengah. Kondisi ini disebabkan pencapaian pada tahun 2015 rendah kenaikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 6: Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan

d. Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan tingkat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu lima (5) tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, capaian rata-rata lama sekolah adalah 6,13 tahun meningkat menjadi 6,33 tahun pada tahun 2015. Namun jika dilihat peningkatannya, dalam rentang lima tahun terakhir cukup rendah hanya sebesar 0,2 tahun. Kinerja ditahun 2015 pun kenaikannya rendah. Sementara itu, dibandingkan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih lebih rendah. Dengan kondisi capaian sampai dengan tahun 2015, menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih setaraf SD/MI. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 7: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan

e. Prestasi Insan Pendidikan

Penghargaan yang diperoleh insan pendidikan di Kabupaten Grobogan di Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

a) Tahun 2011

1. Juara Harapan I Lomba mendongeng anak TK;
2. Juara I Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Atletik;
3. Juara II Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI);
4. Juara I lomba Inseminator Piagam Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara.

b) Tahun 2012

1. Juara III Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Mapel IPS;
2. Juara II Lomba LOMOJARI SMP Terbuka;
3. Juara III Kumite -53 Kg Pi Cabang Karate;
4. 8 Besar Menulis Artikel Ilmiah.

c) Tahun 2013

1. Juara II Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) Cab. Tata Boga;
2. Sekolah Adiwiyata Yaitu SMPN 1 Tegowanu, SMPN 3 Gubug;
3. Juara II Kejuaraan Nasional 2013 Cab. Karate Putri;
4. Juara I Kejuaraan Nasional 2013 Cab. Karate Putra;
5. Juara I Gamamed Fak kedokteran UGM 2013, An. Caesar Robin (SMAN 1

- Purwodadi);
6. Juara I Gamamed Fak kedokteran UGM 2013, An. Widi Fatmawati dan Widya Purbaningrum (SMAN 1 Purwodadi);
 7. Juara II Piala Mendagri Cab. Karate;
 8. Juara II POPNAS;
 9. Juara III POPNAS;
 10. Juara II O2SN SMK Tk Nasional cab. Volly;
 11. Piagam/Penghargaan Tk. Nasional Kabupaten Penggerak Koperasi Tahun 2013 dengan Peringkat Paramadhana Madya Nugraha Koperasi;
 12. Juara III PON 2013 Cab. Volli Putri.

Realisasi anggaran 2012-2016

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,692,756,000.00	2,573,695,462.00	95.58	119,060,538.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	582,344,000.00	570,165,950.00	97.91	12,178,050.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65,000,000.00	50,483,000.00	77.67	14,517,000.00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	847,500,000.00	839,679,000.00	99.08	7,821,000.00
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	116,026,354,500.00	43,475,449,790.00	37.47	72,550,904,710.00
6	Program Pendidikan Menengah	5,165,000,000.00	4,347,878,250.00	84.18	817,121,750.00
7	Program Pendidikan Non Formal	892,500,000.00	846,728,000.00	94.87	45,772,000.00
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,559,775,000.00	5,535,787,150.00	99.57	23,987,850.00
9	Program Penunjang Pelayanan Pendidikan	300,000,000.00	153,511,000.00	51.17	146,489,000.00
10	Program Pendidikan Berkelanjutan	120,000,000.00	119,850,000.00	99.88	150,000.00
11	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	50,000,000.00	49,720,000.00	99.44	280,000.00
JUMLAH		134,711,204,500.00	60,698,237,002.00	45.06	74,012,967,498.00

Tabel 29:Realisasi Anggaran Tahun 2012

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,180,500,000	8,027,222,360	98.13	19,988,053,117
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	577,500,000	571,910,900	99.03	153,277,640
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31,200,000	29,531,350	94.65	5,589,100
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,778,000,000	1,661,180,100	93.43	1,668,650
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	159,728,651,918	140,980,109,641	88.26	116,819,900
6	Program Pendidikan Menengah	3,913,500,000	3,564,563,200	91.08	18,748,542,277
7	Program Pendidikan Non Formal	1,664,000,000	1,656,341,450	99.54	348,936,800
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,341,750,000	3,192,905,350	95.55	7,658,550
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,934,285,000	2,477,854,450	84.44	148,844,650
10	Program Pendidikan Berkelanjutan	100,000,000	99,910,000	99.91	456,430,550
11	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	50,000,000	49,805,000	99.61	90,000
JUMLAH		182,299,386,918	162,311,333,801	89.04	195,000

Tabel 30: Realisasi Anggaran Tahun 2013

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,691,100,000.00	2,614,131,791.00	97.14	76,968,209.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		668,109,847.00	95.34	32,690,153.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	700,800,000.00	30,974,300.00	99.28	225,700.00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	31,200,000.00	844,666,000.00	99.02	8,334,000.00
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	853,000,000.00	46,416,769,533.00	82.31	9,974,592,521.00
6	Program Pendidikan Menengah	56,391,362,054.00	5,573,217,800.00	56.02	4,375,219,200.00
7	Program Pendidikan Non Formal	9,948,437,000.00	2,116,745,000.00	107.72	(151,745,000.00)
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,965,000,000.00	3,501,250,500.00	98.14	66,374,500.00

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3,567,625,000.00	9,769,467,550.00	95.91	416,582,450.00
10	Program Pendidikan Berkelanjutan	10,186,050,000.00	87,990,000.00	87.99	12,010,000.00
11	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.00
JUMLAH		86,484,574,054.00	71,673,322,321.00	82.87	14,811,251,733.00

Tabel 31: Realisasi Anggaran Tahun 2014

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,938,720,000.00	2,806,341,347.00	95.5	132,378,653.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	871,500,000.00	814,804,622.00	93.49	56,695,378.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34,000,000.00	33,993,500.00	99.98	6,500.00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,062,000,000.00	1,043,253,000.00	98.23	18,747,000.00
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	41,312,917,616.00	34,014,567,927.00	82.33	7,298,349,689.00
6	Program Pendidikan Menengah	22,107,173,035.00	7,832,884,500.00	35.43	14,274,288,535.00
7	Program Pendidikan Non Formal	2,118,400,000.00	2,069,196,000.00	97.68	49,204,000.00
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8,085,900,000.00	7,483,009,500.00	92.54	602,890,500.00
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3,433,892,000.00	3,127,485,950.00	91.08	306,406,050.00
10	Program Pendidikan Berkelanjutan	100,000,000.00	94,190,000.00	94.19	5,810,000.00
11	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	50,000,000.00	50,000,000.00	100	0
JUMLAH		82,114,502,651.00	59,369,726,346.00	72.3	22,744,776,305.00

Tabel 32: Realisasi Anggaran Tahun 2015

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,273,219,500	3,021,818,425	92.32	251,401,075
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607,520,000	590,826,941	97.25	16,693,059
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250,000,000	246,615,000	98.65	3,385,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	156,000,000	155,437,000	100	563,000
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	916,800,000	900,230,000	98.19	16,570,000
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	30,850,057,802.00	24,065,407,435.00	78.01	6,784,650,367.00
7	Program Pendidikan Menengah	5,994,674,309.00	5,461,654,809.00	91.11	533,019,500.00
8	Program Pendidikan Non Formal	2,422,600,000.00	2,304,594,000.00	95.13	118,006,000.00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8,124,900,000.00	7,824,302,000.00	96.30	300,598,000.00
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,479,100,000.00	2,106,982,400.00	84.99	372,117,600.00
11	Program Pendidikan Berkelanjutan	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
JUMLAH		58,448,091,111	46,727,868,010	79.95	11,720,223,101.00

Tabel 33: Realisasi Anggaran Tahun 2016

F. Permasalahan dan Tantangan Layanan Pendidikan di Kabupaten Grobogan

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat hingga tahun 2009 menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan pada periode tahun 2016-2021 sebagai berikut.

1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan

Sejumlah permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut.

a. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas

Tingkat capaian pelayanan PAUD baru mencapai 61,51% pada tahun 2015 dengan disparitas dan kualitas yang bervariasi. Belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program Taman Kanak-kanak (TK) usia 4—6 tahun, taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis (SPS).

- b. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan

Berbagai keberhasilan telah dicapai sampai dengan tahun 2015, terutama dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan tahun 2016-2021. Kondisi ini antara lain terlihat pada tingkat disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi yang masih cukup tinggi untuk SMP/MTs. Selain itu, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar masih cukup tinggi. Pada tahun 2015, angka putus sekolah untuk SD adalah sebesar 0,03% (43 siswa) dari seluruh jumlah siswa dan untuk SMP adalah sebesar 0,61% (402) dari seluruh jumlah siswa. Sementara angka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk SD adalah 97,83 % untuk SMP adalah sebesar 72,78%.

Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas. Meskipun pada tingkat kabupaten rasio guru terhadap siswa cukup baik, distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masih rendah. Hingga tahun 2015, sekitar 88,89% dari guru SD/MI yang berkualifikasi S1/D4, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 90,96%,. Kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- c. Kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan masih terbatas

Guna mengakomodasi keyakinan dan keinginan kuat bagi orang dewasa agar tidak berhenti belajar dalam rangka meningkatkan kecakapan atau pengetahuan, serta melakukan perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan dinamika di masyarakat. Disamping itu, pemerintah juga memberikan layanan dan memfasilitasi kepada kelompok masyarakat ini untuk dapat terus belajar sambil bekerja guna meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.

- d. Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal

Sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan antara lain mencakup pendidik dan tenaga kependidikan,.

- e. Sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan belum optimal

Belum optimalnya tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusun PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi.

2. Tantangan Pembangunan Pendidikan

Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan selama periode tahun 2010—2015 dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 mendatang sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah;
- b. menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata;
- d. mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, serta kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- e. menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata;
- f. menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal;
- g. mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan;
- h. memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan merupakan bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan strategis Dinas Pendidikan. Hasil identifikasi permasalahan pendidikan diantaranya bersumber dari capaian kinerja Renstra periode sebelumnya yang dikemukakan pada bab 2 dan perkembangan isu-isu yang muncul kemudian. Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan. Adapun permasalahan pendidikan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas
2. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan
3. Kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan masih terbatas
4. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Masih belum optimalnya tata kelola layanan pendidikan.

Permasalahan utama tersebut dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat, hal ini terlihat dari capaian APK PAUD yang pada tahun 2015 baru tercapai sebesar 61,51%. Sementara itu, lembaga PAUD yang terakreditasi baru tercapai sebesar 5,08% pada Tahun 2015.
- b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar, hal ini ditandai dari capaian APM SD pada tahun 2015 sebesar 97,69% dan APM SMP sebesar 87,06%. Sementara itu, APK SD tahun 2015 sebesar 106,65% dan APK SMP sebesar 100,03%. Dibandingkan dengan capaian APK secara nasional 97,31% dan APK SLTP sebesar 74,29% maka APK SD dan SLTP Kabupaten Grobogan di atas rata-rata APK tingkat Nasional.

Tingginya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar disebabkan adanya kebijakan:

- a. Penerapan Kebijakan sekolah gratis
- b. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan dasar
- c. Masih terdapatnya anak putus sekolah, tercatat pada tahun 2015 angka putus sekolah pada SD/MI sebesar 0,03%, SMP/MTs sebesar 0,61%.

Distribusi angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Angka Putus Sekolah	
		SD+MI	SMP+MTs
01	Kedungjati	0,00	0,00
02	Karangrayung	1,30	0,18
03	Penawangan	0,07	0,00
04	Toroh	0,00	0,00
05	Geyer	0,03	0,04
06	Pulokulon	0,03	1,47
07	Kradenan	0,05	0,28
08	Gabus	0,03	0,18
09	Ngaringan	4,19	1,55
10	Wirosari	0,01	0,29
11	Tawangharjo	0,04	0,66
12	Grobogan	0,05	0,13
13	Purwodadi	0,00	0,17
14	Brati	0,06	5,06
15	Klambu	0,03	0,00
16	Godong	0,02	0,18
17	Gubug	0,03	0,37
18	Tegowanu	0,09	0,00
19	Tanggungharjo	0,05	0,09
	Rata-rata	0,03	0,61

Tabel34: Distribusi Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar per Kecamatan se Kabupaten Grobogan

Pada tingkat SD/MI APS tertinggi sebesar 4,19% berada di Kecamatan Ngaringan disusul Kecamatan Karangrayung sebesar 1,30%. Di tingkat SMP/MTs APS tertinggi di Kecamatan Brati sebesar 5,06% disusul Kecamatan Ngaringan sebesar 1,55%.

- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini terlihat dari persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 secara keseluruhan pada Tahun 2015 tercapai 87,50%.

Rincian kualifikasi pendidikan guru Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Kualifikasi Pendidikan Guru Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Jenis Guru	Jumlah Guru		Persentase	
	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1
Guru TK	1.224	1.121	52,20%	47,80%
Guru SD	772	6.107	11,22%	88,78%
Guru SMP	357	3.341	9,65%	90,35%

Tabel 35: Kualifikasi Pendidikan Guru Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa guru TK yang belum berkualifikasi D4/S1 masih 1.224 guru atau sama dengan 52,20% sedangkan di tingkat SD masih 772 guru atau sama dengan 11,22% dan sebagian besar sudah mendekati usia pensiun. Di SMP guru yang berkualifikasi S1/D4 tinggal 357 guru atau sama dengan 9,65% sebagian sudah mendekati usia pensiun.

- e. Masih rendahnya ketersediaan sarana ruang kelas pada pendidikan dasar, terutama pada satuan pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 ruang kelas dalam kondisi baik hanya sebesar 55,69%.

Rincian kondisi ruang kelas SD Negeri kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TAHUN	SD			SLTP		
		RB	RR	B	RB	RR	B
1	2011	1.519	371	2.375	77	70	1.566
2	2012	1.765	1.354	1.711	47	110	366
3	2013	1.466	1.276	2.546	109	261	1.557
4	2014	683	2.931	1.269	200	958	446
5	2015	291	2.790	1.205	156	915	362
6	2016	943	2.959	1.173	148	1048	322

Tabel 36: Kondisi Ruang Kelas SD dan SLTP Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, ruang kelas yang dalam kondisi tidak baik masih cukup banyak, jumlah yang cukup signifikan untuk masing-masing tingkat. Ruang kelas yang kurang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak optimal akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik.

- f. Masih terdapat penduduk dengan kondisi buta huruf, tercatat pada tahun 2015 masih ada sekitar 8,13% penduduk belum melek huruf

Rincian warga belajar keaksaraan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Kecamatan	L	P	JUMLAH
1	KEDUNGJATI	152	771	923
2	GABUS	420	1.337	1.757
3	KRADENAN	141	655	796
4	GEYER	85	355	440
5	WIROSARI	23	77	100
6	KARANGRAYUNG	10	40	50
7	KLAMBU	12	38	50
8	PULOKULON	11	39	50
	JUMLAH	854	3.312	4.166

Tabel 37: Warga Belajar Keaksaraan kabupaten Grobogan Tahun 2016

B. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. **Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan**, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang

8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi bupati, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mendukung terhadap upaya pencapaian misi Misi 4 yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”.

Adapun tujuan dan sasaran misi ke-4, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk

Pada sasaran **misi ke-4** ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan bertanggungjawab terhadap **sasaran ke-1** yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan

Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Grobogan dapat disimak pada tabel berikut:

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	PAUD Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak pada PAUD	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembangnya anak.	Adanya gerakan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan usia dini melalui sosialisasi

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Rendahnya kualitas SDM pengelola PAUD, sarana prasarana dalam penyelenggaraan PAUD	Sebagian besar satuan PAUD didirikan oleh masyarakat dan berstatus swasta, rekrutmen SDM biasanya dilakukan oleh yayasan. Kriteria SDM tidak menjadi dasar dalam rekrutmen. Sarana prasarana pendidikan cenderung seadanya dan akan dipenuhi sambil berjalan	• Tersedia kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM PAUD. • Tersedia bantuan untuk sarpras PAUD dan pengembangan PAUD
	Persentase PAUD yang terakreditasi baru 5,08%	Kuota PAUD yang akan diakreditasi melalui dana APBD masih sangat terbatas.	Peningkatan anggaran APBD untuk akreditasi PAUD ditingkatkan.
2.	Pendidikan Dasar • Belum optimalnya penyediaan sarana penunjang belajar yaitu laboratorium dan Perpustakaan • Belum tersediaanya ruang kelas yang representatif.		
	Masih adanya penduduk usia sekolah yang belum bersekolah	Masih minimnya prasarana SD dan SMP yang memadai khususnya laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas	Rehabilitasi dan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dilakukan secara bertahap melalui anggaran APBD dan DAK.
	Masih adanya penduduk usia sekolah yang belum bersekolah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD	Tersedia beasiswa berupa Bantuan Siswa Miskin baik dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten
	Kualitas lulusan SMP yang masih rendah	belum optimalnya kapasitas pendidik dalam melakukan pembinaan siswa	adanya bintek-bintek bagi pendidik yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembinaan kesiswaan

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
3.	Pendidikan Non Formal Masih banyaknya program kegiatan Pendidikan Non Formal yang belum sesuai dengan kebijakan teknis / petunjuk teknis.	belum diketahuinyastandarpengelolaan/manajemenPendidikanNon Formal oleh pengelola	Adanya peningkatan kapasitas pendidikan non formal melalui bintek manajemen pengelolaan lembaga pendidikan non formal
	Masih rendahnya lembaga kursus yang berijin yaitu baru 25 %	belum optimalnya pengelolaan pendidikan non formal	adanya sosialisasi dan bintek peningkatan mutu dan pengelolaan lembaga Pendidikan non formal.
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kompetensi pendidkan formal guru TK dan guru pendidikan dasar masih belum optimal	Masih rendahnya minat tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal.	Memberikan kemudahan dalam perijinan studi lanjut dan mengusahakan bantuan biaya studi lanjut melalui APBD dan sumber-sumber yang lain.
	Belum semua guru pendidikan dasar memperolehsertifikasi	Kuota peserta sertifikasi yang terbatas dan belum terpenuhinya persyaratan sebagai peserta sertifikasi	Adanya pengelolaan penilaian angka kredit, dan penilaian kinerja pendidikdan tenagakependidikan
	Tingkat kelayakan mendidik TK/RA dan pendidikan dasar belum optimal	Belum optimalnya kapasitas guru dalam melaksanakan TK/RA dan pendidikan dasar	Adanya bimbingan teknis bagi guru TK/RA dan pendidikan dasar untuk meningkatkan kompetensi dan kelayakan mengajar
5.	Manajemen Layanan Pendidikan	Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) belum dapat sepenuhnya diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam Standar PelayananMinimal (SPM).	Dukungankuat stakeholder untukmemperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tabel 38: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. Telaah Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi strategis Kemendikbud tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini
2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
3. Peningkatan Kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
5. Peningkatan Mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
6. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan
7. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan
8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

b. Sasaran Strategis

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya angka Partisipasi peserta didik PAUD	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7%
SS1.2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/Paket C)	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71%
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		sebesar 0,6
		Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS3.2	Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK	Angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK maksimal sebesar 5%

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekarang- kurangnya 96,1%
SS4.2	Meningkatnya program kursus dan	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS4.3	Meningkatnya jumlah lembaga/satuan pendidikan Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5.1	Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0
		Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5.2	Meningkatnya Karakter/ perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS5.3	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
SS5.4	Meningkatnya penerapan KKNi dalam bidang kejuruan di SMK	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNi minimal sebanyak 70%

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6.1	Meningkatnya jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas profesional	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
SS6.2	Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
		Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6.3	Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%
		Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.4	Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%
		Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.5	Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%
		Jumlah SMP memiliki jumlah guru Sesuai SPM sebanyak 83%
		Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%

7. Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS7) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7.1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks gotong royong di atas 0,55
		Indeks toleransi di atas 0,49

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7.2	Meningkatnya mutu Bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing SDM Indonesia	Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
		Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)
SS7.3	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah pemelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang
SS7.4	Meningkatnya penutur non-Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang

8. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T.8): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS8) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8.1	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas	Sejumlah minimal 54,6% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)

Kode	SasaranStrategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8.2	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
SS8.3	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini WajarTanpaPengecualian (WTP)
SS8.4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak pada PAUD	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembangnya anak.	Adanya gerakan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan usia dini melalui sosialisasi
		Rendahnya kualitas SDM pengelola PAUD, sarana prasarana dalam penyelenggaraan PAUD	Sebagian besar satuan PAUD didirikan oleh masyarakat dan berstatus swasta, rekrutmen SDM biasanya dilakukan oleh yayasan. Kriteria SDM tidak menjadi dasar dalam	- Tersedia kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM PAUD. - Tersedia bantuan untuk sarpras PAUD dan pengembangan PAUD

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			rekrutmen. Sarana prasarana pendidikan cenderung seadanya dan akan dipenuhi sambil berjalan	
		Persentase PAUD yang terakreditasi baru 5,08%	Kuaota PAUD yang akan diakreditasi melalui dana APBD masih sangat terbatas.	Peningkatan anggaran APBD untuk akreditasi PAUD ditingkatkan.
	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	• Belum optimal nya penyediaan sarana penun- jang belajar yaitu laboratorium dan Perpustakaan • Belum tersedia- nya ruang kelas yang represen- tatif. bagi SD	Masih minimnya prasarana SD dan SMP yang mema- dai khususnya laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas	Rehabilitasi dan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dilakukan secara bertahap melalui anggaran APBD dan DAK.
		Masih adanya penduduk usia sekolah SD yang belum bersekolah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD	Tersedia beasiswa berupa Bantuan Siswa Miskin baik dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten
		Kualitas lulusan SMP yang masih rendah	belum optimalnya kapasitas pendidik dalam melakukan pembinaan siswa	adanya bintek-bintek bagi pendidik yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembinaan kesiswaan
2.	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Masih adanya pen- duduk usia 15-60 tahun yang belum melek huruf.	Motivasi penduduk yang belum melek huruf sangat rendah mengikuti program, mereka lebih cenderung untuk mencari penghasilan.	Program keaksa- raan harus dibarengi dengan program keca- kapan hidup dan bantuan usaha.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Meningkatnya programkursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI	Masih rendahnya mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) karena masih sedikit lembaga yang sudah memiliki akreditasi dan memiliki penilaian kinerja minimal C.	Kurangnya tenaga akreditasi kursus dan banyaknya lembaga Kursus yang tidak mengajukan akreditasi	Tersedia SOP akreditasi kursus
4.	Meningkatnya jumlah lembaga/ satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah satuan pendidikan masyarakat yang melakukan pendidikan keluarga sangat terbatas	Belum tersosialisasi- sikannya pendidikan keluarga dan belum tersedia petunjuk pelaksanaannya	Kesiapan Kabupaten Grobogan untuk meng implementasikan pendidikan keluarga
5.	Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah	Kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah masih rendah	Kualitas pendidik, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah belum optimal.	Peningkatan kompetensi pendidik, proses pembelajaran, dan MBS melalui bintek, MGMP/KKG dan supervisi perlu diintensifkan.
6.	Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Belum optimalnya satuan pendidikan dalam melakukan pendidikan karakter	Pengintegrasian pendidikan karakter dalam mata pelajaran belum optimal.	Bahan ajar dan panduan pendidikan karakter sudah disediakan.
7.	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);	Komite sekolah belum berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,	Bekerja sama dengan pengurus Dewan Pendidikan untuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah.
		Belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum 2013	Tenaga pendidik belum terampil mengimplementasikan kurikulum 2013 dan belum tersedia sarana penunjang.	Supervisi oleh pengawas sekolah secara intensif dan pemenuhan sarana penunjang pelaksanaan K 13.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.	Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional	Kompetensi pendidikan formal guru TK dan guru pendidikan masyarakat masih belum optimal	Kesempatan untuk mengikuti studi lanjut terbatas dan alasan ketiadaan biaya.	Kemudahan memperoleh iji belajar dan pemberian subsidi studi lanjut dari APBD atau yayasan.
		Rendahnya guru pendidikan dasar yang memperoleh bersertifikasi	Kuota peserta sertifikasi terbatas.	Adanya pengelolaan penilaian angka kredit, dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
9.	Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4	Sebagian besar guru yang belum berkualifikasi S1 sudah mendekati usia pensiun.	Kemudahan memperoleh iji belajar dan pemberian subsidi studi lanjut dari APBD atau yayasan.
10.	Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Masih rendahnya jumlah kepala sekolah yang memahami manajemen pendidikan pada satuan pendidikan	Terbatasnya kapasitas diklat atau bimtek bagi kepala sekolah	Motivasi kepala sekolah untuk meningkatkan kapasitas tinggi
11.	Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Masih minimnya kompetensi Pengawas Sekolah.	Rendahnya motivasi pengawas untuk meningkatkan kompetensi	Tersedia alokasi dana untuk meningkatkan kompetensi pengawas
12.	Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Semakin banyak satuan pendidikan yang kekurangan guru PNS sehingga sekolah mengangkat guru wiyata bhakti.	Kuota pengangkatan tenaga pendidik sangat terbatas sementara guru yang memasuki masa pensiun semakin banyak	Merger SD yang kekurangan murid dan usulan pengadaan guru,
13.	Meningkatnya	• Rendahnya par-	Masih kurangnya	adanya gerakan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas	partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak pada PAUD Pada kategori tingkat PAUD, menunjukkan APK PAUD pada tahun 2015 sebesar 61,51%	kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembangnya anak.	mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan usia dini melalui sosialisasi
14.		Masih banyaknya program kegiatan Pendidikan Non Formal yang belum sesuai dengan kebijakan teknis/ petunjuk teknis.	belum diketahuinya standar pengelolaan /manajemen Pendidikan Non Formal oleh pengelola	Adanya peningkatan kapasitas pendidikan non formal melalui bimtek manajemen pengelolaan lembaga pendidikan non formal
15.		Masih rendahnya lembaga kursus yang berijin yaitu baru 25 %	belum optimalnya pengelolaan pendidikan non formal	adanya sosialisasi dan bintek peningkatan mutu dan pengelolaan lembaga Pendidikan non formal.
	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah	- Masih adanya penduduk usia sekolah SD yang belum bersekolah - masih rendahnya capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2015 APM tingkat SD/MI di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 mencapai 97,69% - Pada tingkat SMP /MTs, tahun 2015 menunjukkan APM sebesar 87,06%	Masih ada sebagian masyarakat yang enggan untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD	Tersedia beasiswa berupa Bantuan Siswa Miskin baik dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten

Tabel 39: Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

D. Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pendidikan adalah: **“Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan”** Makna Visi tersebut adalah:

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.
- b. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian dan standar pengelolaan
- c. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global.
- d. Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal.
5. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif.

Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi yaitu:

- a. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjangkau. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan layanan Pendidikan Usia Dini yang merata di semua wilayah Desa/Kelurahan di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun yang bermutu di Jawa Tengah. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- c. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Misi ini merupakan

upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka merealisasikan Program Pendidikan Menengah Universal di Jawa Tengah.

- d. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di semua jenjang dan ketunaan di Jawa Tengah.
- e. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah.
- f. Mewujudkan Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di semua jenjang secara profesional, akuntabel, berbudaya dan berkarakter di Jawa Tengah.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin.
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang berkualitas dan terjamin.
Sasaran : a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembina-pembi-naan potensi peserta didik PAUD.

- b. Terwujudnya lembaga Pendidikan Non Formal yang setara, sarana prasarana yang memadai dan pengembangan warga belajar yang berkualitas.
2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar.

Sasaran : Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang merata.
 3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata.

Sasaran : Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh.
 4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan.

Sasaran : Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara.
 5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sasaran : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Tujuan : Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Sasaran : a. Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah.
b. Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan
c. Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan.
d. Meningkatnya kapasitas dan sarana/ prasarana aparaturnya serta pelayanan administrasi perkantoran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kabupaten Grobogan berdasar-kan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD.	Rendahnya kualitas sarana prasarana dalam penyelenggaraan PAUD	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini masih kurang memadai.	Tersedia bantuan untuk sarana prasarana PAUD dan pengembangan PAUD
		Belum semua PAUD menggunakan kurikulum sesuai standard pendidikan PAUD	Belum dipahaminya penerapan kurikulum PAUD	adanya sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola PAUD dalam menerapkan kurikulum dan melakukan pembinaan
2.	Terwujudnya lembaga Pendidikan Non Formal yang setara, sarana prasarana yang	Sarana prasarana pendidikan non formal yang	Keterbatasan anggaran APBD untuk peningkatan kualitas	adanya fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi pendidikan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	memadai dan pengembangan warga belajar yang berkualitas.	masih rendah kualitas dan kuantitasnya dan pengembangan warga belajar yang belum optimal.	dan kuantitas sarpras pendidikan non formal dan kesadaran warga belajar mengikuti kegiatan masih rendah,	non formal dan peningkatan motivasi dan fasilitasi kepada warga belajar pendidikan non formal.
		Masih banyaknya program kegiatan Pendidikan non formal yang belum sesuai dengan kebijakanteknis/ petunjuk teknis.	Kurangnya pemahaman penyelenggara pendidikan non formal dalam pengelolaan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan	Adanya peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan non formal melalui bimtek manajemen pengelolaan lembaga pendidikan non formal
3.	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang merata.	Pemahaman terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 masih rendah.	Bimtek tentang kurikulum 2013 belum dilakukan secara berkelanjutan dan supervisi yang intensif belum dilaksanakan.	Bimtek tentang kurikulum 2013 yang berkelanjutan melalui pelatihan dan KKG / MGMP serta pelaksanaan supervisi kelas secara intensif.
4.	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh.	Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih kurang dari sisi kualitas dan kuantitas serta pembinaan	Ketersediaan anggaran APBD untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan sangat terbatas serta	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara bertahap dan pengembangan kompetensi siswa dilakukan secara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		potensi siswa dan penerapan kurikulum yang menyeluruh	pengembangan kompetensi siswa belum berkelanjutan.	berkelanjutan.
5.	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya pelayanan pendidikan yang setara.	Kesenjangan sarana prasarana pendidikan antar satuan pendidikan dan kesenjangan hasil pendidikan peserta didik antar satuan pendidikan.	Kesenjangan kualitas input peserta didik dan kesenjangan satuan pendidikan desa dan kota, menyebabkan kesenjangan sarana prasarana dan kualitas hasil pendidikan.	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, dengan skala prioritas menuju satuan pendidikan yang setara
6.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi.	Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum berkualifikasi sesuai ketentuan dan belum memiliki kompetensi yang memadai.	Terbatasnya kuota bantuan studi lanjut para pendidik dan tenaga kependidikan dan terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi.	Adanya upaya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
7.	Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan	Pendidikan karakter kebangsaan bagi peserta didik oleh pendidik belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh.	Pemahaman pendidik tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter kebangsaan	Bintek implementasi pendidikan karakter kebangsaan melalui kurikulum 2013 sosialisasi bagi para pendidik.
8.	Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di	Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen	Kemauan sekolah untuk menerapkan MBS secara	Peningkatan peran pengawas sekolah melalui supervisi dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	bidang pendidikan.	Berbasis Sekolah (MBS);	benar kurang	peningkatan peran komite sekolah dalam pelaksanaan MBS.

Tabel 40: Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan aturan tersebut, sehingga mulai tahun anggaran 2017 fokus mengurus satuan pendidikan SMA dan SMK. Konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka dana dekosentrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk bidang pendidikan dapat dipastikan akan mengalami penurunan jumlah.

E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

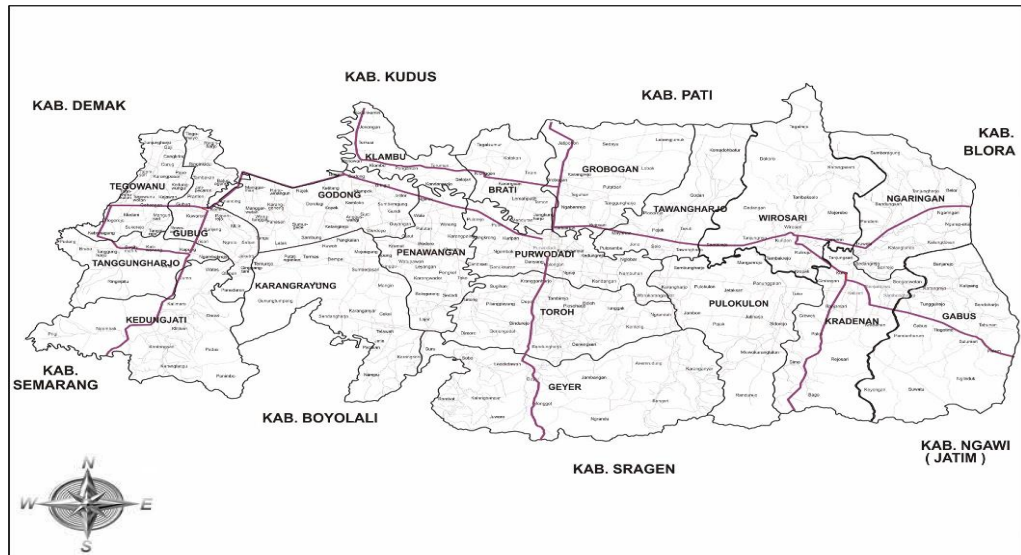
1. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah sebesar 1.975,86 km², dan merupakan kabupaten terluas nomor dua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Letak wilayah Kabupaten Grobogan berada pada 110°15' - 110°25' Bujur Timur dan 7° - 7°30' Lintang Selatan, diantara dua pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan yang membujur dari arah barat ke timur dan berada di bagian timur. Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri atas 19 kecamatan, 273 desadan 7 kelurahan dengan ibukota kabupaten berada di kota Purwodadi.

Kabupaten Grobogan berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
 Sebelah Timur : Kabupaten Blora
 Sebelah Selatan : Kabupaten Sragen, Boyolali, Semarang dan Ngawi (Jawa Timur). Peta Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar.



Gambar 8: Peta Kabupaten Grobogan

Peta Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan memiliki topografi daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya yang dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu:

- Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan antara 0° - 8° meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Wirosari bagian selatan.
- Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8° - 15° meliputi wilayah Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan bagian utara dan Wirosari bagian utara.
- Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15° meliputi wilayah kecamatan yang berada di bagian selatan wilayah Kabupaten Grobogan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dibagi menjadi tanah sawah dan tanah bukan sawah. Tanah sawah seluas 82.757 hektar atau sebesar 41,88

persen dari luas wilayah total. seluas 68.050,144 hektar Penggunaan lahan pertanian sawah terdiri sawah irigasi sebesar 32969 Ha dan sawah tadah hujan sebesar 49.788 Ha. Luas lahan non pertanian di Kabupaten Grobogan mencapai 25.091 Ha, sementara tanah pertanian bukan sawah mencapai 89.738 Ha.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan pembagian zonasi wilayah berdasarkan pola ruang wilayah Kabupaten Grobogan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 meliputi:

1). Kebijakan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Grobogan terdapat beberapa kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu:

- a). pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur
- b). peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten bagian timur Jawa Tengah
- c). pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan (Pulokulon, Toroh, Wirosari, Penawangan) yang berdayasaing dalam skala pelayanan nasional
- d). pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas
- e). pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan
- f). peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara

2) Strategi Penataan Ruang

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Grobogan disusun strategi penataan ruang wilayah, yang meliputi:

- a). Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;
- b). Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;
- c). Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;
- d). Strategi pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya
- e). Strategi pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, dayatampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan;
- f). Strategi pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- g). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

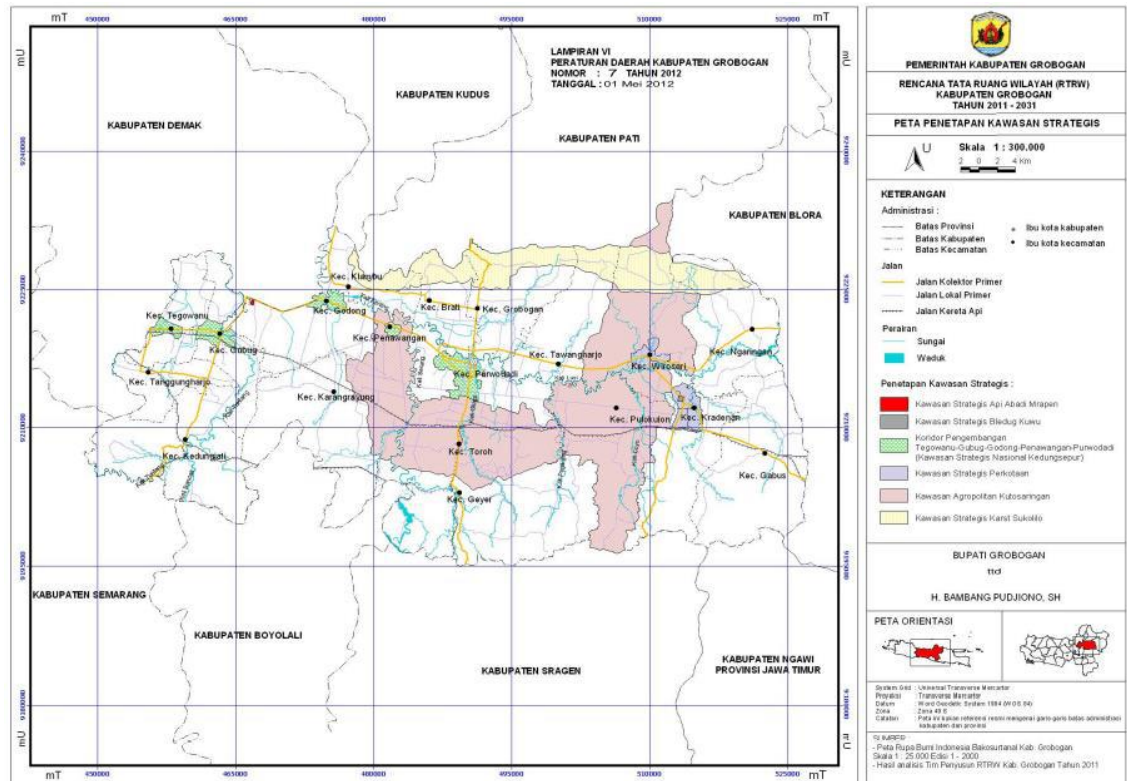
3) Kawasan Strategis

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031, rencana penetapan kawasan strategis kabupaten meliputi:

- a). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - Koridor pengembangan Tegowanu–Gubug – Godong–Penawangan – Purwodadi sebagai bagian dari KSN Kedungsepur;

- Kawasan agropolitan Kutosaringan, yaitu: Kecamatan Pulokulon dengan produksi jagung dan kedelai; Kecamatan Toroh dengan produksi jagung; Kecamatan Wirosari dengan produksi sapi potong dan jagung; dan Kecamatan Penawangan dengan produksi melon, semangka dan kacang hijau.
 - Kawasan strategis perkotaan, yaitu: perkotaan Wirosari di Kecamatan Wirosari; dan perkotaan Kradenan di Kecamatan Kradenan.
- b). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukunglingkungan hidup, meliputi kawasan bentang alam karst Sukolilo yangterdapat di:
- Kecamatan Klambu
 - Kecamatan Brati
 - Kecamatan Grobogan
 - Kecamatan Tawangharjo
 - Kecamatan Wirosari, dan
 - Kecamatan Ngaringan
- c). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, meliputi:
- Kawasan Mrapen di Kecamatan Godong; dan
 - Kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan

Peta pengembangan kawasan strategis berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber: Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Grobogan Tahun 2011-2031
Gambar 9: Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

Berdasarkan kajian tata ruang di atas, dapat dikemukakan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan harus memperhatikan tata ruang/wilayah. Karena itu, komponen-komponen berikut harus menjadi perhatian:

- Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Grobogan
- Demografi terutama yang berkaitan dengan jumlah penduduk berdasarkan usia dan distribusi penduduk.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi:
 - Angka Harapan Hidup (AHH)
 - Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - Rata-rata lama sekolah, dan
 - Penduduk miskin

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi lingkungan hidup strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan hidup strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan hidup strategis dimaksud.

4. Tren pendapatan yang semakin meningkat

Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebesar Rp.2.374.362.555.000,00 pada tahun 2016 menjadisebesar Rp 3.380.657.615.877,00. Peningkatan pendapatan ini dihitungmenggunakan asumsi sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend pendapatann PAD lainnya.
- Dana perimbangan disusun dengan asumsi tidak terjadi perubahan kebijakan yang mendasar atas pengalokasian dana transfer dari pemerintah sampai dengan Tahun 2019. Dana Alokasi Khusus (DAK) sama dengan APBD tahun 2016.
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disusun dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/ DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Perkembangan Demografi Kabupaten Grobogan

Pada tahun 2015 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 909.290 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 442.139 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 49%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 49 orang yang non produktif.

Struktur usia penduduk Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel 44:

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk		Jumlah
		L	P	
1.	0 - 4	51,561	48,228	99,789
2.	5 - 9	55,876	51,882	107,758
3.	10 -14	54,969	51,734	106,703
4.	15 -19	61,224	58,898	120,122
5.	20 – 24	62,800	58,759	121,559
6.	25 – 29	61,642	57,348	118,990
7.	30 – 34	58,837	56,969	115,806
8.	35 – 39	56,210	54,871	111,081
9.	40 – 44	49,607	51,030	100,637
10.	45 – 49	49,111	52,121	101,232
11.	50 – 54	46,327	50,353	96,680
12.	55 – 59	41,343	40,629	81,972
13.	60 – 64	27,963	26,558	54,521
14.	65 – 69	19,449	20,059	39,508
15.	70 – 74	13,208	16,127	29,335
16.	75 +	17,000	21,509	38,509
Jumlah		727,127	727,075	1,444,202

Sumber: Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016

Tabel 41: Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan

Bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

6. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara

(dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antarumat beragama, penggunaan obat-obat terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negatif lainnya yang menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (*role model*) dalam membangun karakter diri. Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong peserta didik menjadi manusia yang mandiri, berdaya saing, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi panutan. Negara harus memfasilitasi mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

7. Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

8. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Grobogan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah tersebar di beberapa daerah yang masih tertinggal, seperti Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Karangrayung, dan Kecamatan Toroh.

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		Akdm/PT	SMU/SMK	SMP	SD	Tdk/Blm Tamat SD	
1.	Kedungjati	582	3.429	8.271	13.430	11.324	37.036
2.	Karangrayung	1.208	5.045	11.113	30.845	34.589	82.800
3.	Penawangan	919	4.015	9.141	19.941	20.120	54.135
4.	Toroh	1.615	9.641	18.671	41.164	27.642	98.732
5.	Geyer	657	3.647	7.954	23.148	21.083	56.490
6.	Pulokulon	1.012	4.720	11.985	40.555	34.730	93.002
7.	Kradenan	1.137	4.775	8.860	30.976	24.254	70.002
8.	Gabus	834	3.471	7.325	28.405	23.397	63.433
9.	Ngaringan	737	3.223	6.169	29.963	21.007	61.098
10.	Wirosari	1.736	683	9.575	34.811	26.222	73.027
11.	Tawangharjo	766	4.248	9.403	20.044	15.667	50.128
12.	Grobogan	1.154	5.577	10.299	26.542	24.753	68.325
13.	Purwodadi	7.724	25.150	28.788	38.490	23.093	123.245
14.	Brati	642	3.007	7.227	18.461	13.140	42.477
15.	Klambu	400	2.046	6.142	11.836	11.521	31.945
16.	Godong	2.032	7.998	17.077	23.347	22.043	72.497
17.	Gubug	1.998	9.944	18.563	21.861	18.527	70.894
18.	Tegowanu	976	4.330	8.599	17.384	17.408	48.696
19.	Tanggungharjo	613	4.150	9.322	11.645	10.996	36.726
Jumlah		26.742	109.098	214.483	482.850	401.516	1.444.202

Tabel 42: Persebaran Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Grobogan

F. PenentuanIsu-IsuStrategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan lima tahun yang akan datang yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk mengetahui lingkungan internal dan eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), Lingkungan internal meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Kekuatan/Strengths

1. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat besar;
2. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
3. Berkembangnya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
4. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi terus meningkat;
5. Guru yang bersertifikat mengalami peningkatan;
6. Prestasi yang di raih Kabupaten Grobogan baik tingkat Provinsi maupun nasional dalam penyelenggaraan pendidikan cukup bagus;
7. Persentase guru SD layak mengajar sudah mencapai 90 %
8. Persentase guru SMP memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan mencapai 93 %
9. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 mencapai 88,94 %.

2. Kelemahan/Weaknesses (W)

1. Dalam struktur belanja Dinas Pendidikan yang berasal dari APBD kabupaten Grobogan jika dibandingkan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung tidak proporsional, sehingga kinerja spending performances dalam mendanai pelayanan pendidikan masih belum optimal dan efektif.
2. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
3. Kualitas dan relevansi layanan pendidikan bagi orang dewasa berkelanjutan belum sepenuhnya optimal;
4. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum sepenuhnya optimal;
5. Grobogan merupakan Kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, beberapa desa dan kecamatan memiliki aksesibilitas rendah dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai

Menindaklanjuti analisis diatas, adapun isu-isu strategis pembangunan pendidikan jangka menengah Kabupaten Grobogan yang menjadi prioritas penanganan untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan sekolah yang terjangkau oleh masyarakat khususnya Pendidikan AnakUsia Dini
2. Peningkatan layanan pendidikan dasar yang berkualitas seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya
3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan
4. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan baik kualifikasi maupun kompetensinya
5. Peningkatan tatakelola layanan pendidikan yang lebih optimal dalam rangka efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan Strategis

Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, adalah

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mempunyai berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-4, yaitu **“Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan**, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”.

Pada misi ke 4 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan memiliki tugas terhadap pencapaian kualitas pelayanan pendidikan khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta manajemen pelayanan pendidikan.

Tujuan Strategis dirumuskan untuk menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan di dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dirumuskan secara lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, termasuk satuan pendidikan (sekolah). Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif.

Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, rumusan tujuan dapat memberi arahan pada perumusan sasaran, satu rumusan tujuan (bersifat kualitatif) dapat dicapai dengan beberapa sasaran (bersifat kuantitatif). Secara umum tujuan strategis Dinas Pendidikan kabupaten Grobogan sesuai sasaran RPJMD 2016-2021 adalah:

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan

Dengan indikator tujuan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dirumuskan untuk memandu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut:

Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan yang bermutu

Penjelasan dari sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu. Peningkatan partisipasi pendidikan khususnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu untuk ditingkatkan dalam lima tahun ke depan, mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh

kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Sosialisasi tentang pentingnya PAUD tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Lembaga PAUD diperlukan kerja sama sama dengan lembaga lain seperti Darma Wanita, PKK, dan perangkat daerah yang lain.

2. Tersedia dan terjangkau layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas, namun masih ditemui peserta didik yang drop out dan mengulang kelas. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun mengamatkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun wajib duduk di bangku sekolah. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan berkewajiban menjaga agar tidak terjadi anak usia sekolah drop out, apabila terpaksa ke luar sekolah harus difasilitasi supaya tetap bisa mengikuti pendidikan. Setiap peserta didik di pendidikan dasar tidak hanya memperoleh kepastian mendapatkan akses pendidikan, tetapi setiap anak harus mendapat akses pendidikan yang bermutu. Akses pendidikannya didapatkan secara adil dan merata, kualitas pelayanan lembaganya juga merata. Sekolah di desa tidak berbeda dengan sekolah di perkotaan, baik mengenai kualitas pelayanan pendidikan, kualitas SDM, maupun kualitas sarana prasarananya
3. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu. Layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, homeschooling dan parenting education dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa;
4. Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten. Peningkatan kualitas pendidikan diawali dari peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penguatan peran guru dan

tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada upaya peningkatan kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh penerapan system uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru yang sah, transparan dan berkesinambungan, peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Peningkatan kompetensi pengawas sekolah dan pengelola pendidikan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah dan guru sudah berada pada jalur yang benar dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan. Penguatan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil koordinasi, sinkronisasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan.

Peningkatan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, layanan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pendidikan.

Penguatan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa bertujuan untuk Inventarisasi, pembinaan pelaksanaan inventarisasi, serta pelaporan barang milik daerah, selain itu bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan.

Penguatan pelaksanaan fungsi lain mencakup: pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan, penguatan pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan tersedianya analisis dan sinkronisasi kebijakan

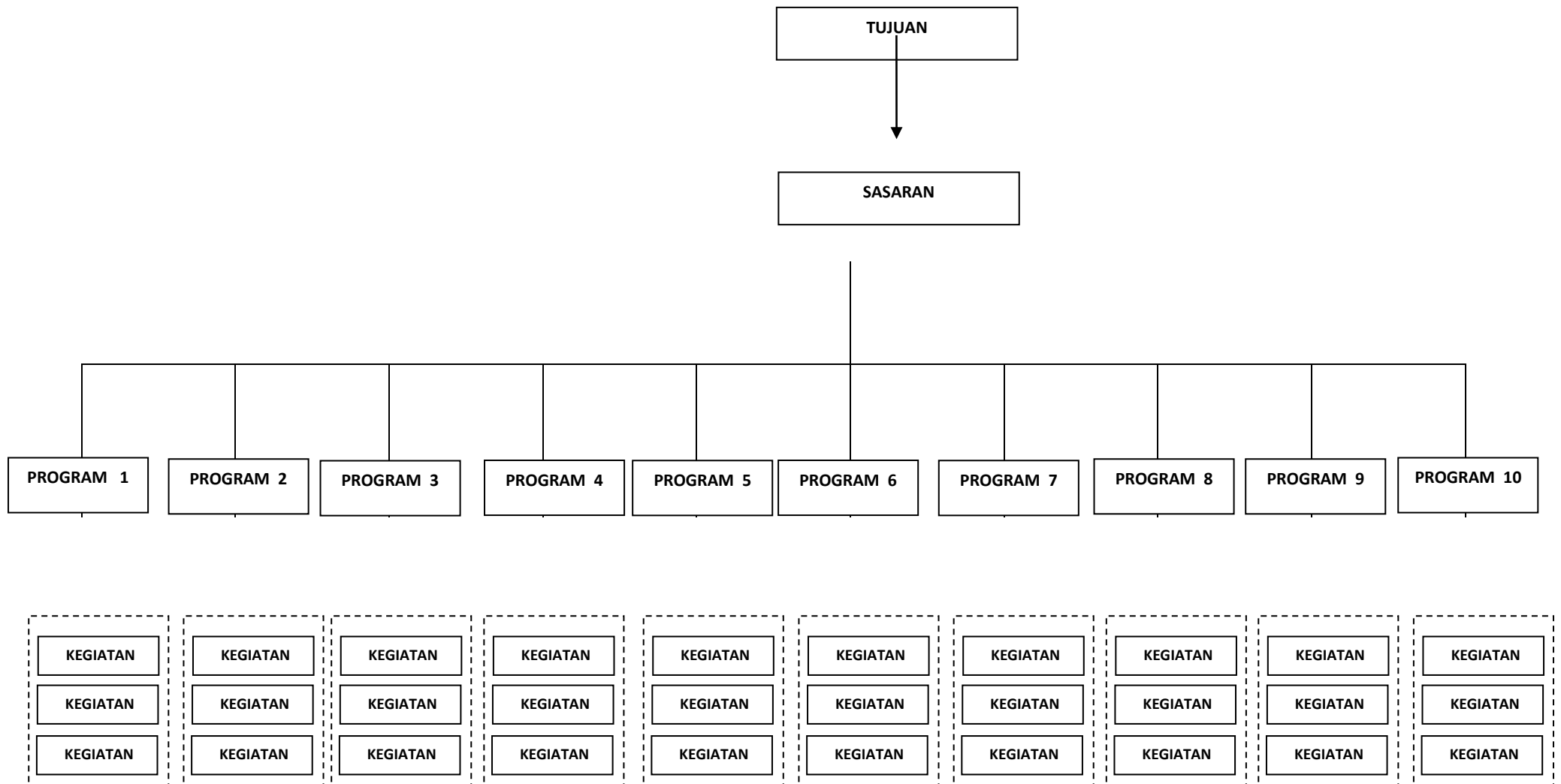
Sasaran strategis dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, relevan dan dapat dicapai dalam kurun waktu periode Renstra. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran untuk mengukur apakah sasaran dapat mengkonfirmasi tujuan akan dicapai pada masa depan (tahun 2021).

TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATORNYA

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI 2016	KONDISI 2021
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan		Indek rata-rata lama sekolah	Thn	6.92	7.04
			Indek harapan lama sekolah	Thn	12.35	12.79
		1. Tersedia dan terjangkau-nya layanan pendidikan yang bermutu	APK PAUD 4-6 tahun	%	60.30	70.00
			Indek Literasi Masyarakat usia > 15 tahun	%	91.89	91.99
			APK SD	%	106.65	106.85
			APK SMP	%	100.05	100.24
			Angkakelulusan SD	%	100.00	100.00
			Angkakelulusan SMP	%	100.00	100.00

C. Desain Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan strategis, sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran strategis yang tertuang di dalam RPJMD, perlu disusun desain pencapaian tujuan dan sasaran, melalui program dan kegiatan, yang secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut:



A. Tahapan Pencapaian Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Program

	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	DATA AWAL 2016	RENCANA CAPAIAN				
					2017	2018	2019	2020	2021
sipasi menempuh		1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,92	6,93	6,95	6,98	7,01	7,04
		2. Lama harapan sekolah	Tahun	12,35	12,44	12,54	12,63	12,73	12,82
gis jangkau- didikan		1. APK PAUD 4-6 Tahun	%	61,55	61,58	61,62	61,71	61,75	61,79
		2. APK SD/MI	%	106,69	106,72	106,75	106,79	106,83	106,85
		3. Angka kelulusan SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4. APK SMP/MTs	%	100,05	100,09	100,14	100,17	100,21	100,24
		5. Angka kelulusan SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6. Indek Literasi Masyarakat	%	91,89	91,91	91,93	91,95	91,98	91,99
	1. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Indek Ketersediaan Layanan PAUD (Rasio penduduk usia	Indek Rasio	64	62	60	58	56	54

	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	DATA AWAL 2016	RENCANA CAPAIAN				
					2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Sasaran Program</u> Tersedianya dan terjangkaunya layanan PAUD yang bermutu	PAUD per sekolah)							
		Prosentase PAUD terakreditasi	%	5,12	5,15	5,19	5,21	5,34	5,62
	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Pembinaan Sekolah Dasar/SD)	Indek Ketersediaan (Rasio penduduk usia SD Per Sekolah) < 168	Indek Rasio		168	168	168	168	168
	<u>Sasaran Program</u> Tersedianya dan terjangkaunya layanan SD yang bermutu	Angka Melanjutkan (AM)	%		100	100	100	100	100
		Angka Putus Sekolah (APtS) maksimal	%		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Prosentase Lembaga SD Terakreditasi minimal B	%		83,3	84,5	85,3	86,5	87,7
	3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Pembinaan Sekolah Menengah Pertama/SMP)	Indek Ketersediaan (Rasio penduduk usia SMP Per Sekolah) < 576	Indek Rasio		576	576	576	576	576
	<u>Sasaran Program</u> Tersedianya dan terjangkaunya	Angka Melanjutkan (AM)	%		100	100	100	100	100
		Angka Putus Sekolah (APtS) maksimal	%		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	DATA AWAL 2016	RENCANA CAPAIAN				
					2017	2018	2019	2020	2021
	layanan SMP yang bermutu	Prosentase Lembaga SMP Terakreditasi minimal B	%		83,2	84,6	86,2	87,6	89,2
	4. Program Pembinaan Pendidikan Non Formal <u>Sasaran Program</u> Tersedianya dan terjangkaunya layanan PNF yang bermutu	Prosentase Lembaga PNF Terakreditasi	%		3,00	4,00	5,80	8,80	11,70
	5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan <u>Sasaran Program</u> Tersedianya dan tercukupinya pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Rasio Guru PAUD per Rombel	%		100	100	100	100	100
		Rasio Guru SD per Rombel 100<>130	%		100	100	100	100	100
		Rasio Guru SMP per Mapel per sekolah >100	%		100	100	100	100	100
		Prosentase Guru S1/DIV	%		86,20	88,40	90,20	92,40	94,48
		Prosentase Guru SD Tsertifikasi Pendidik	%		46,00	47,00	48,00	49,00	50,00
		Prosentase Guru SMP Tsertifikasi Pendidik	%		54,00	56,00	58,00	60,00	62,00

	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	DATA AWAL 2016	RENCANA CAPAIAN				
					2017	2018	2019	2020	2021
	6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan <u>Sasaran Program</u> Tersedianya sistem tatakelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan	Nilai SAKIP			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Opini Pemeriksa			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMD 2016—2021 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan 2016—2021

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat daerah yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Penjabaran lebih lanjut arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu

Meningkatkan akses PAUD dengan cara (a) perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD untuk menjangkau anak kurang beruntung, dan (b) penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 4-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak.

2. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan dasar yang bermutu

Memberikan pemenuhan hak terhadap layanan pendidikan dasar yang berkualitas melalui (i) fasilitasi akses bantuan bagi siswa miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP); (ii) Penguatan lembaga melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (iii) pembudayaan/perluasan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (iv) penyediaan pendidikan kecakapan hidup/keterampilan adaptif sehingga anak dengan disabilitas dapat hidup lebih mandiri dan siap beradaptasi untuk berkarya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan non formal yang bermutu

Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan, dilaksanakan melalui (a) penyediaan insentif bagi warga masyarakat untuk mengikuti pelatihan atau kursus, dan (b) memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis. Meningkatkan kualitas pendidikan keaksaraan, melalui cara (a) peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

(b) pendidikan kesetaraan; dan (c) penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta pemberdayaan masyarakat melalui desavokasi.

4. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten

Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan, melalui strategi: (a) penguatan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (b) pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (c) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dan (d) pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan

Meningkatkan pengelolaan, khususnya dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui strategi: (a) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan tenaga kependidikan dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; (d) penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata; dan (e) pemberian fasilitas bagi guru dan tenaga kependidikan honorer K2 maupun non K2.

5. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjaminter selenggarakan pelayanan prima pendidikan

menguatkan manajemen kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui strategi (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanjadaerah, (ii) Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Dinas (iv) Peningkatan Layanan Prima dalam Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas

TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat		Indeks rata-rata lama sekolah	Peningkatan layanan akses pendidikan yang lebih merata	
			Indeks harapan lama sekolah	Peningkatan layanan pendidikan yang bermutu	
		1. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu	APK PAUD 4-6 tahun	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		2. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu	Prosentase Penduduk usia > 15 tahun melek huruf	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Non Formal serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)
		3. Tersedia dan terjangkau layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu	APK SD	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar SD termasuk peningkatan ruang penunjang lainnya (RPL) serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Memberikan pemenuhan hak terdapatnya layanan pendidikan dasar yang berkualitas (SD)
			Angka Kelulusan SD		
			APK SMP	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar SMP termasuk peningkatan ruang penunjang lainnya (RPL) serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Memberikan pemenuhan hak terdapatnya layanan pendidikan dasar yang berkualitas (SMP)
			Angka Kelulusan SMP		

O	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		4. Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Rasio Guru per Rombel	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajarnya siswa	Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan
			Prosentase Guru berkualifikasi S1/DIV		
		5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan	Terselenggaranya Sistem Perencanaan yang andal	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja daerah	Meningkatkan Manajemen Layanan Pendidikan
			Terselenggaranya layanan umum dan tata laksana perkantoran yang prima	memperjelas tata laksana dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Meningkatkan Layanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Opini Badan/institusi Pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Program

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Tabel di bawah ini, menunjukkan program, kegiatan, indikator kinerja program, serta rencana capaiannya setiap tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Tabel: Program Indikator Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan	bln	12	12	12	12	12	12	60

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
		Kebersihankantor								
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bln	12	12	12	12	12	12	60

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Penyediaan bahan logistic kantor	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan bahan logistik kantor	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah	Terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah	bln	12	12	12	12	12	12	60
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	bln	12	12	12	12	12	12	60
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Terpenuhinya Fasilitas Prasarana Pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	Pkt	1	1	1	1	1	1	5
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	pkt	1	1	1	1	1	1	5
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	unit	200	200	200	200	200	200	1000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Gedung Kantor terpelihara	paket	1	1	1	1	1	1	5

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor terpelihara	paket	1	1	1	1	1	1	5
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur terpelihara	unit	24	24	24	24	24	24	120
	Rehabilitasisedang/beratgedungkantor	Gedung kantor yang representatif	paket	1	1	1	1	1	1	5
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat KinerjaDisiplinAparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaanmesin/kartua bsensi	Tercukupinyakebutuhanmesin/kartuabse nsi	unit	-		850				850
	PengadaanPakaianDinas BesertaPerlengkapanny a	TercukupinyakebutuhanPakaianDinasBes ertaPerlengkapanny a	unit	110	110	110	110	110	110	550
	Pengadaanpakaiankhus ushari-haritertentu	TercukupinyakebutuhanPakaiankhususha ri-haritertentu	unit	-	110	110	110	110	110	550
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Kapasitas SDM Aparatur Dinas Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	Meningkatnya kompetensi peserta Pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	org	-	100	100	100	100	100	500
	Sosialisasiperaturanperu ndang-undangan	Tersosialisasinyaper aturanperundang- undangan	keg	1	1	1	1	1	1	5

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggarakannya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pembinaan Kesehatan jasmani dan rohani bagi aparatur	jumlah kegiatan Pembinaan Kesehatan jasmani dan rohani bagi aparatur	bln	12	12	12	12	12	12	60
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Opini Badan/institusi Pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	dok	1	1	1	1	1	1	5
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	dok	2	2	2	2	2	2	10
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	dok	1	1	1	1	1	1	5
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	dok	1	1	1	1	1	1	5
	Pengelolaan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Persediaan/Aset	Terselenggarakannya sosialisasi Pengelolaan sistem Penatausahaan	keg	1	1	1	1	1	1	5

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Lancar	Persediaan/Aset Lancar								
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini		Prosentase PAUD Terakreditasi	%	5.08	5.15	5.19	5.22	5.25	5.31	5.31
	Pemeliharaan rutin dan berkalabangunansekolah	Terlaksananya Pemeliharaan rutin dan berkalabangunanTK Negeri	Tk	3	3	3	3	3	3	15
	Rehabilitasi sedang/beratbangunasekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/beratbangunanTK Negeri	Tk	3	3	3	3	3	3	15
	Pengadaanalatpraktik dan peragasiswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar dan Dalam PAUD	TK	10	10	10	10	10	10	50
	Pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini	TerselenggarakannyakegiatanpengembanganPAUD	keg	1	1	1	1	1	1	5
	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan AnakUsia Dini	TerlaksananyaSosialisasi Pendidikan Inklusi Taman Kanak Kanak	keg/thn	1	1	1	1	1	1	5
	Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini	TerlaksananyakegiatanpenyelenggaraanPAUD	pkt	1-	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan data dan informasi Pendidikan anakUsia Dini	Tersedianya data Pendidikan AnakUsia Dini	dok	1	1	1	1	1	1	5

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Dini									
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Angkakelulusan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Pengembangan Kurikulum dan Penilaian SD	Terselenggarakannya kegiatan Pengembangan Kurikulum dan sistem Penilaian SD	Keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Terselenggarakannya kegiatan Pembinaan peserta didik dan pendidikan karakter SD	Keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Terselenggarakannya kegiatan pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana SD	Keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Kurikulum dan Penilaian SMP	Terselenggarakannya kegiatan Pengembangan Kurikulum dan sistem Penilaian SMP	Keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Terselenggarakannya kegiatan Pembinaan peserta didik dan pendidikan karakter SMP	Keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Terselenggarakannya kegiatan pengembangan kelembagaan dan	Keg	1	1	1	1	1	1	5

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
		pengembangan sarana prasarana SMP								
8. Program Pendidikan Non Formal (PNF)		persentase PKBM sesuai SPM	%	5.08	5.15	5.19	5.22	5.25	5.31	5.31
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Terselenggarakannya kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik non formal	keg	-	1	1	1	1	1	5
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Tersalurkannya Bantuan Operasional Pendidikan non Formal	keg	-	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Terselenggarakannya kegiatan pendidikan Keaksaraan	keg	-	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggarakannya kegiatan pengembangan pendidikan kecapan hidup	Kel. belajar	2	2	2	2	2	2	10
	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Terlaksananya Bimtek manajemen pengelolaan lembaga Pendidikan Non Formal	keg	-	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	Tersedianya data Pendidikan Non Formal	dok	-	1	1	1	1	1	5
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan										

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Pengembangan Layanan Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggarakannya kegiatan pengembangan layanan administrasi PTK	dok	-	3	3	3	3	3	15
	Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggarakannya kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggarakannya kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	keg	1	1	1	1	1	1	5
10. Perogram Manajemen Pelayanan Pendidikan		sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan	%	-	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Tersusunnya dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKA/DPA)	dok	-	3	3	3	3	3	15
		Terselenggarakannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan OPD	dok	-	1	1	1	1	1	5
		Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja bidang pendidikan (LAKIP/LPPD)	dok	-	1	1	1	1	1	5

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersusunnya dokumen profil pendidikan	dok	-	1	1	1	1	1	5
		Tersusunnya dokumen profil pendidikan berbasis gender	dok	-	1	1	1	1	1	5
		Tersusunnya dokumen Data Pendidikan update	dok	1	1	1	1	1	1	5
		Terselenggarakannya Workshop Penyusunan Rencana Kerja (Musrenbang)	dok	1	1	1	1	1	1	5
	Pengendalian dan Pengawasan Penerapan azafisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Terselenggarakannya Bimtek Penyusunan RKAS BOS SD-SMP	keg	1	1	1	1	1	1	5
		Terselenggarakannya Bimtek Penyusunan RKA/DPA OPD	keg	1	1	1	1	1	1	5
		Erselenggarakannya Work-shop Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	keg	1	1	1	1	1	1	5
		Terselenggarakannya fasilitas penunjang ujian Nasional/UASBN	keg	1	1	1	1	1	1	5
	Pembinaan Dewan Pendidikan	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Penunangan Dewan Pendidikan	keg	1	1	1	1	1	1	5

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Rencana Capaian Per tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Penunangan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten	terpenuhinya Penunangan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten	keg	1	1	1	1	1	1	5

b. Tabel43: Rencana Program dan KegiatanRenstraDinas Pendidikan KabupatenGroboganTahun 2016-2021

B. Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan serta rencana capaiannya selama kurun waktu lima tahun sudah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah menghitung rencana kebutuhan dana setiap kegiatan selama kurun waktu lima tahun. Rencana kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan bersifat indikatif artinya hasil penghitungan pendanaan sifatnya perkiraan besarnya.

Mengapa perkiraan? Karena rencana kebutuhan pendanaan ditentukan beberapa faktor diantaranya :

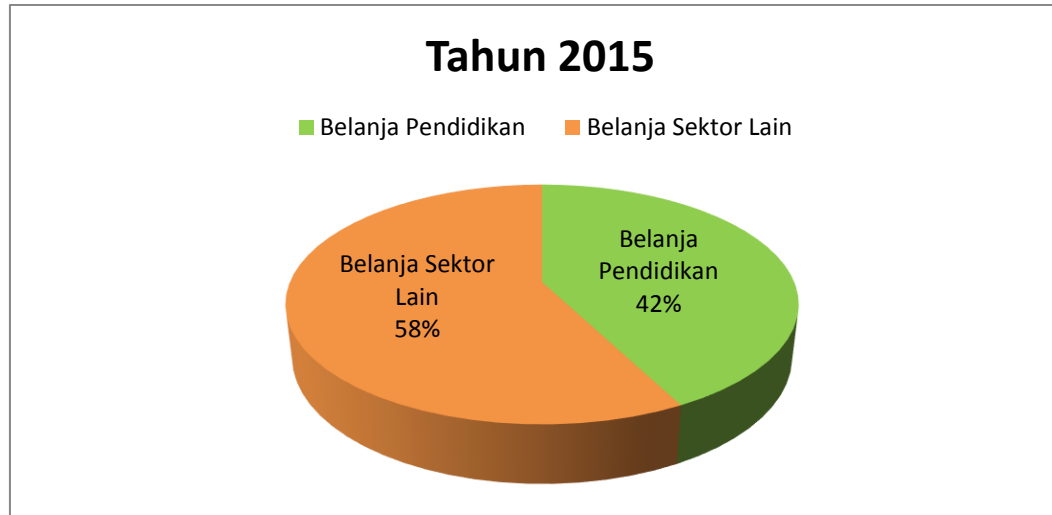
1. Perubahan harga satuan barang dan jasa. Pemerintah kabupaten setiap tahun mengeluarkan peraturan bupati tentang harga satuan barang dan jasa. Perbup ini yang dipedomani untuk menyusun rencana pendanaan untuk membiayai setiap kegiatan. Harga satuan bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil dari harga perkiraan.
2. Perubahan Rencana Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber Pendapatan dalam APBD kabupaten berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, serta Pendapatan Lain yang syah. Sumber-sumber pendanaan bisa mengalami kenaikan, tetap, atau bahkan berkurang. Itulah sebabnya, kebutuhan sumber pendanaan bersifat indikatif.
3. Perubahan kebijakan di bidang pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dapat berupa mengganti kebijakan lama dengan kebijakan yang baru, misalnya perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Ada pula pemerintah memberlakukan kebijakan baru

seperti *full day school*. Perubahan kebijakan akan berdampak kepada kebutuhan pendanaan.

Merancang kebutuhan pendanaan indikatif dapat menggunakan referensi dari program, kegiatan, dan rencana kebutuhan dana pada APBD tahun-tahun sebelumnya, cara ini yang paling banyak dilakukan dan praktis. Tentu saja apabila menggunakan

cara ini harus memperhatikan dengan cermat hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan , dan realisasi pembiayaan tahun sebelumnya.

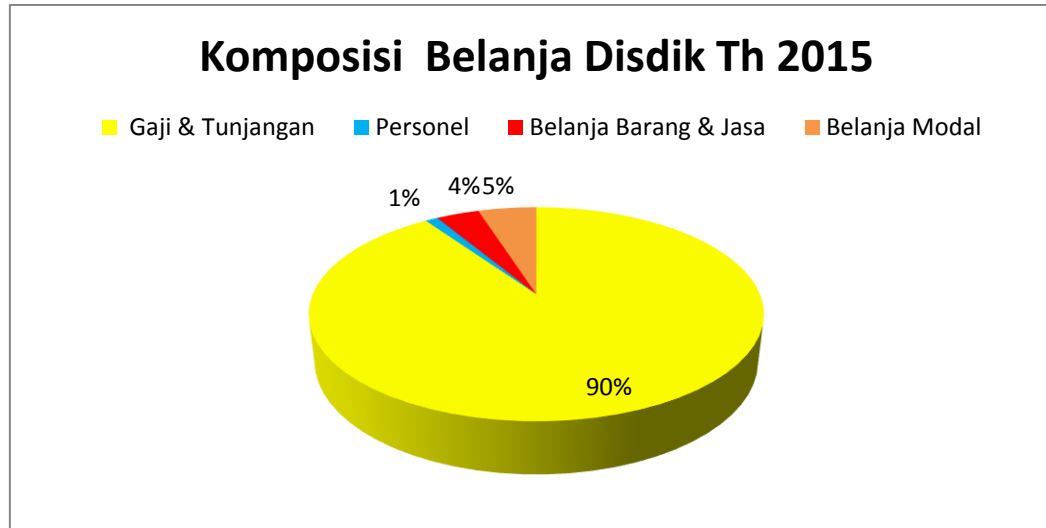
Komposisi pendanaan sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun 2015, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 10 : Komposisi Belanja Sektor Pendidikan dibandingkan dengan Sektor Lain Pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Berdasarkan gambar di atas dapat dikemukakan bahwa belanja sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten Grobogan sebesar 42% atau sama dengan Rp. 850.586.525.426;00 dibandingkan dengan belanja sektor-sektor lain yang besarnya 58% atau sama dengan Rp. 1.573.265.891.314;00. Dilihat dari besarnya persentase anggaran pendidikan maka Kabupaten Grobogan telah memenuhi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan anggaran sektor pendidikan minimal 20%.

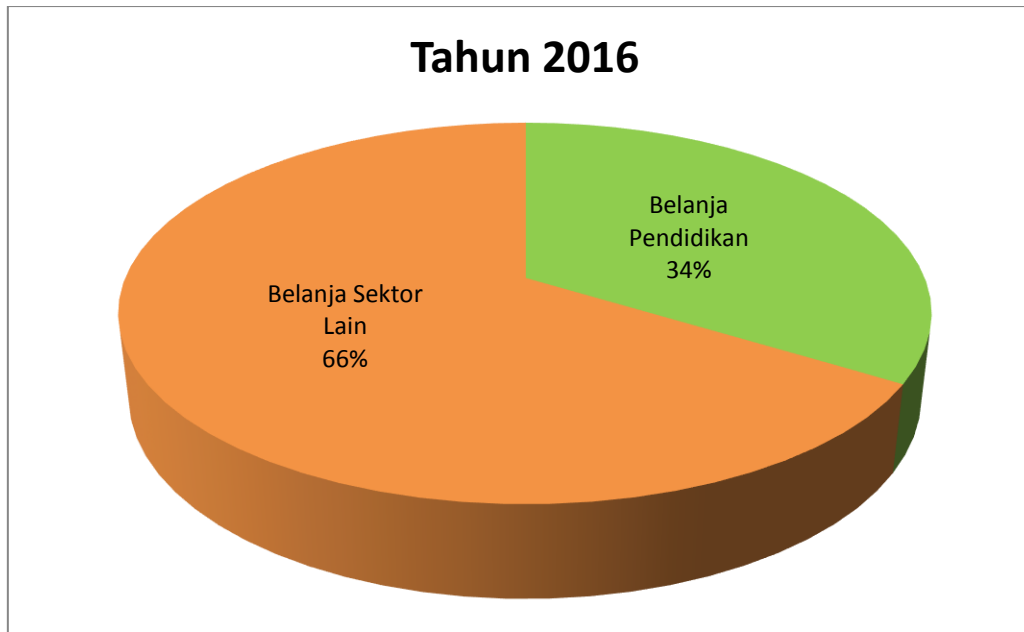
Persentase yang cukup besar untuk belanja sektor pendidikan, pertanyaannya: bagaimana komposisi penggunaan belanja sektor pendidikan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 11 : Komposisi Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015

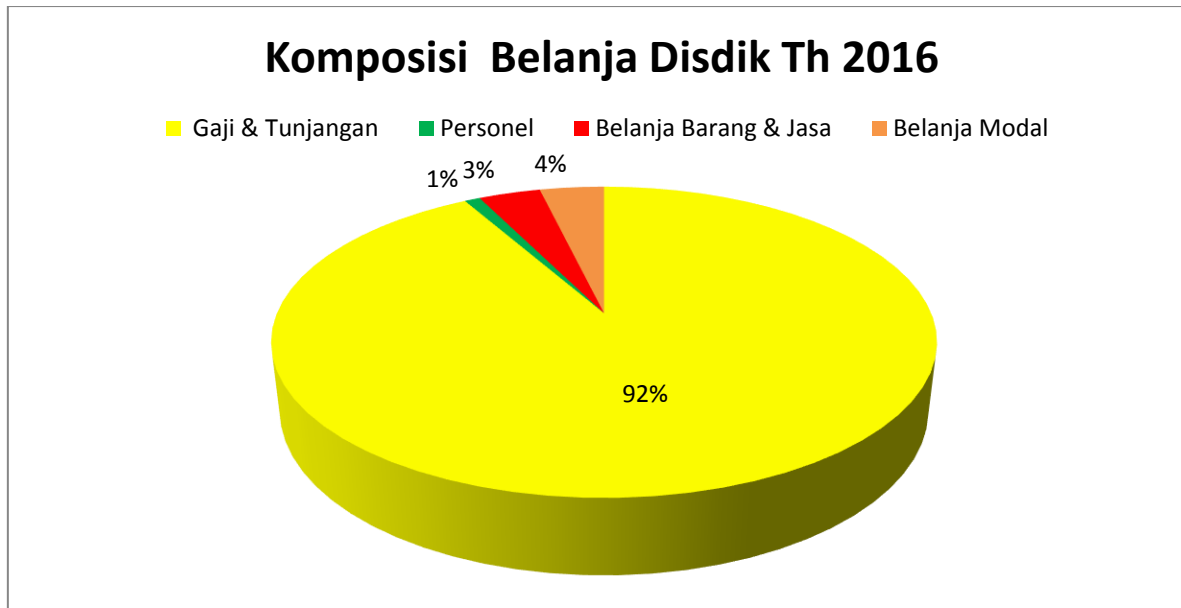
Berdasarkan gambar di atas dapat dikemukakan bahwa belanja sektor pendidikan 90% digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai/guru, sedangkan untuk belanja modal 5%, belanja barang dan jasa 4%, belanja personel 1% komposisi belanja pendidikan tidak ideal karena 90% uang belanja digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Tahun 2016, komposisi pendanaan sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten Grobogan digambarkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 12 : Komposisi Belanja Sektor Pendidikan dibandingkan dengan Sektor Lain Pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Belanja sektor pendidikan dalam APBD kabupaten Grobogan sebesar 34% atau sama dengan Rp. 801.096.763.686;00, turun 8% dibandingkan dengan belanja sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016. Komposisi rencana penggunaan anggaran sektor pendidikan tahun 2016, komposisinya sebagai berikut :



Gambar 13 : Komposisi Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016

Komposisi belanja sektor pendidikan pada tahun 2016, persentase belanja gaji justru menjadi lebih besar yaitu menjadi 92%, sedangkan belanja modal serta belanja barang dan jasa semakin kecil yaitu menjadi 4% dan 3%.

Perbandingan komposisi belanja sektor pendidikan Tahun 2015 dengan Tahun 2016 pada APBD Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

	Belanja APBD kabupaten	Komposisi Belanja Sektor Pendidikan				Total Belanja Pendidikan
		Belanja Gaji	Belanja Personel	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
Tahun 2015	2.006.226.129.000	850.586.525.426	8.964.707.700	31.043.889.705	42.106.355.246	932.701.478.077
Tahun						

2016	2.374.362.655.000	801.096.763.686	7.231.054.400	28.797.467.600	29.907.641.605	867.032.927.291
------	-------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Tabel 44 : Perbandingan Komposisi Belanja Sektor Pendidikan Tahun 2015 dengan Tahun 2016 pada APBD Kabupaten Grobogan

Total belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 18%, sementara total belanja sektor pendidikan mengalami penurunan sebesar 7% dan semua komponen belanja sektor pendidikan mengalami penurunan.

Menghitung Rencana Kebutuhan Dana Setiap Program dan Kegiatan

Penghitungan rencana kebutuhan dana didasarkan pada harga satuan yang berlaku saat tahun penyusunan Renstra dilaksanakan. Harga satuan ini mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan yang berlaku tentang indeks harga barang dan jasa, Patokan Dinas Pekerjaan Umum, Panduan DAK, Petunjuk teknis Bantuan Provinsi atau Dekonsentrasi, Harga yang berlaku di pasar saat itu berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta usulan baru yang dibuat oleh tim penyusun Renstra. Harga satuan tahun berjalan ini kemudian digunakan untuk menentukan harga satuan tahun-tahun berikutnya dengan mengalikan harga satuan. Kebutuhan dana setiap kegiatan kemudian dihitung berdasarkan perkalian antara volume kegiatan tersebut dengan harga satuan yang ditetapkan setiap tahun. Hasil dari penghitungan rencana kebutuhan dana setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi				Rata-rata lama sekolah (RLT)	%		6.92	6.93				6.98		7.01		7.04		Disdik
				Harapan Lama Sekolah (HLS)														Disdik
	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu			APK PAUD 4-6 tahun	%	61,51	61,55	61,58		61,62		61,71		61,75		61,79		Disdik
		Program Pendidikan Anak Usia Dini		Prosentase PAUD Terakreditasi	%	5.08	5.12	5.15	11.573.308.370	5.19	12.560.601.702	5.22	13.663.322.138	5.25	14.505.252.171	5.31	16.284.426.158	Disdik
		Pembinaan Pendidikan anak Usia Dini		Jumlah Kegiatan Pembinaan PAUD	Keg	50	50	60		60		60		60		60		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target
			Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Sarra PAUD	Keg	40	40	40		40		40		40		40		Disdik
																		Disdik
	Tersedia dan terjangkau layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu			APK SD	%	106,65	106,69	106,72		106,75		106,79		106,83		106,85		Disdik
				APK SMP	%	100,03	100,05	100,09		100,14		100,17		100,21		100,24		Disdik
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Angka kelulusan Pendidikan Dasar SD		100	100	100	23.194.917.784	100	25.173.624.903	100	27.383.667.964	100	29.071.041.813	100	32.636.815.145	Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Angka kelulusan Pendidikan Dasar SMP		100	100	100	23.194.917.784	100		100		100		100		Disdik
			Pembangembagan Kurikulum dan Penilaian SD	Jumlah Kegiatan Pembangembagan Kurikulum dan Penilaian SD	Keg	600	600	600		600		600		600		600		Disdik
			Pembinaan Peserta Didik dan Pendidikan Karakter SD	JumlahKegiatanPembinaanPesertaDidik dan Pendidikan Karakter SD	Keg	400	400	400		400		400		400		400		Disdik
			Pengembangan Kelembagaan dan Sarpras SD	JumlahKegiatanPengembanganKelembagaan dan Sarpras SD	Keg	19	19	19		19		19		19		19		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab								
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
			Pembangembagan Kurikulum dan Penilaian SMP	Jumlah Kegiatan Pembangembagan Kurikulum dan Penilaian SMP	Keg	830	830	830		830		830		830		830		Disdik								
			Pembinaan Peserta Didik dan Pendidikan Karakter SMP	JumlahKegiatanPembinaan PesertaDidik dan Pendidikan Karakter SMP	Keg	1.4	1.4	1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		Disdik								
			Pengembangan Kelembagaan dan Sarpras SMP	JumlahKegiatanPengembanganKelembagaan dan Sarpras SMP	Keg	19	19	19		19		19		19		19		Disdik								
	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu			Prosentase Penduduk usia > 15 tahun melek huruf						91.93				91.95				91.98				91.99				Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Program Pendidikan Non Formal		persentase PKBM sesuai SPM pada Tahun 2021 sebesar 5,31%		91.89	91.89	91.91	1.413.535.860		1.534.121.477		1.668.805.081		1.771.636.377		1.988.940.379	Disdik
			Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)	Jumlah Kegiatan Pembinaan PNF	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PNF	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Sarra PNF	Keg	-	-	1		1		1		1		1		Disdik
	Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten			Persentase pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	%	53	53	53		53		53		53		53		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Persentase pendidik SD berkualifikasi S1/D4	%	88	88	88		88		88		88		88		Disdik
				Persentase pendidik SMP berkualifikasi S1/D4	%	93	93	93		93		93		93		93		Disdik
		Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan							5.710.254.483		6.197.383.660		6.741.464.411		7.156.871.535		8.034.713.541	Disdik
		Pengembangan Layanan Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Layanan Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Keg			1		1		1		1		1		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Pengembangan Sumber Daya Pendi dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pendi dan Tenaga Kependidikan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pendi dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pendi dan Tenaga Kependidikan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
	Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam manajemen anggaran pelayanan			sistem tata kelola yang handal dalam manajemen anggaran pelayanan prima pendidikan	bl			12		12		12		12		12		Disdik
		Manajemen layanan pendidikan		Terselenggarakannya Sistem Perencanaan yang andal	Dok	-	5	5	1.571.375.955	5	1.705.426.562	5	1.855.149.383	5	1.969.463.161	5	2.211.032.048	Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Perencanaan dan anggaran	Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan anggaran	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
		Layanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhi layanan Administrasi Perkantoran	Bln	12	12	12	3.030.349.500	12	3.109.330.000	12	2.934.330.000	12	2.934.330.000	12	2.934.330.000	Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keg			1		1		1		1		1		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			PenyediaanMakan dan Minum	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Rapat-rapatKoordinasi dan KonsultasiKe Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Rapat-rapatKoordinasiDalam Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Rapat Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
		PeningkatanSaranaPrasara aAparatur		Tingkat TerpenuhinyaFasilitassarana PrasaranaPegawai	%	-	100	100	598.520.000	100	598.520.000	100	598.520.000	100	598.520.000	100	598.520.000	Disdik

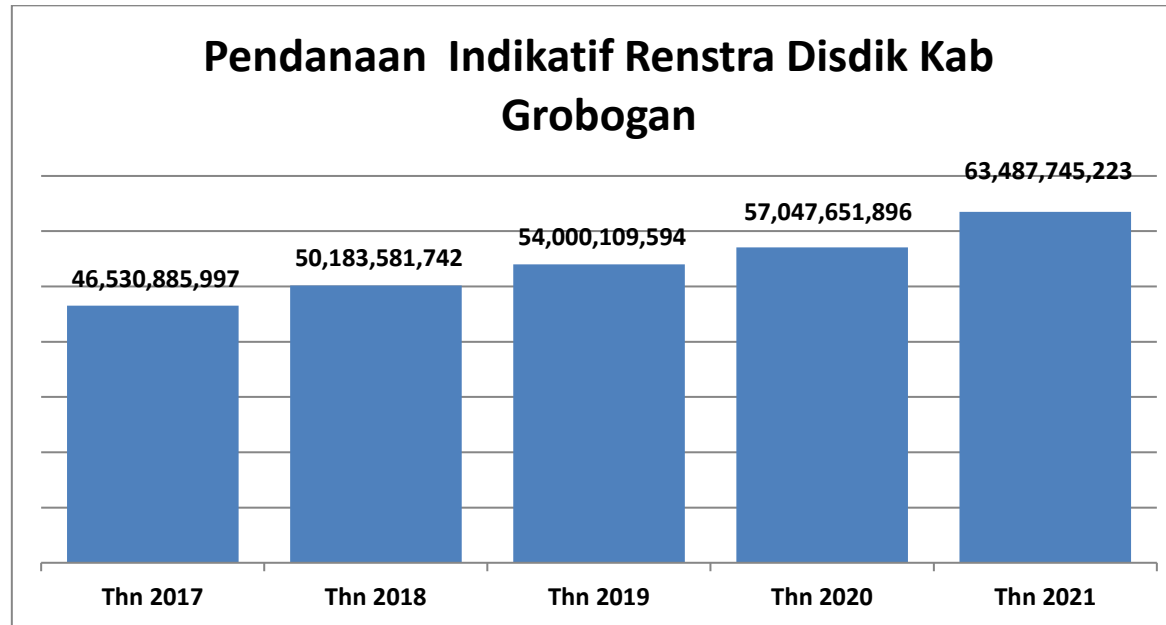
Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Pemeriksaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Rehabilitasi sedang/ Berat Sarana Prasarana Kantor	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi sedang/ Berat Sarana Prasarana Kantor	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
Peningkatan Disiplin Aparatur																		
Tingkat Kinerja Disiplin Aparatur																		
%																		
-																		
100																		
100																		
250.000.000																		
100																		
250.000.000																		
100																		
250.000.000																		
100																		
250.000.000																		
100																		
250.000.000																		
Disdik																		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penilaian Kinerja Aparatur	Terlaksananya kegiatan Penilaian Kinerja Aparatur	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Kapasitas SDM Aparatur Dinas Pendidikan					570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000	Disdik
		Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Bagi Aparatur	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Bagi Aparatur		Keg			1		1		1		1		1		Disdik

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
						2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Opini Badan/institusi Pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Dok			5	190.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000	Disdik
			Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya kegiatan Penataan keuangan	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
			Penyusunan Laporan Aset BMD	Terlaksananya kegiatan Penataan Aset BMD	Keg			1		1		1		1		1		Disdik
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		Terlaksananya kegiatan Penataan Capaian Kinerja	Keg			1		1		1		1		1		Disdik

Tabel 45 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil penghitungan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, maka kebutuhan pendanaan per tahunnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 14 : Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Hasil penghitungan pendanaan indikatif direncanakan untuk membiayai semua program dan kegiatan selama lima tahun guna mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi yang sudah dirumuskan di dalam Renstra. Rekapitulasi hasil penghitungan pendanaan indikatif per program selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Pagu Indikatif Pendanaan					Total Lima Tahun
	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	
Stras	3.030.349.500	3.109.330.000	2.934.330.000	2.934.330.000	2.934.330.000	14.942.669.500
a dan	598.520.000	598.520.000	598.520.000	598.520.000	598.520.000	2.992.600.000
n Aparatur	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.250.000.000
itas atur	570.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	2.850.000.000
mbangan apaian an	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	950.000.000
sia Dini	11.573.308.370	12.560.601.702	13.663.322.138	14.505.252.171	16.284.426.158	68,586,910,539
idikan hun	23.194.917.784	25.173.624.903	27.383.667.964	29.071.041.813	32.636.815.145	137,460,067,609
ikan Non	1.413.535.860	1.534.121.477	1.668.805.081	1.771.636.377	1.988.940.379	8.377.039.174
Pendidik idikan	5.710.254.483	6.197.383.660	6.741.464.411	7.156.871.535	8.034.713.541	33,840,687,630
nan	1.571.375.955	1.705.426.562	1.855.149.383	1.969.463.161	2.211.032.048	9,312,447,109
	48,102,261,952	51,889,008,304	55,855,258,977	59,017,115,057	65,698,777,271	280,562,421,561

Tabel46 : RekapitulasiPenghitunganKebutuhanPendanaanIndikatif Per Program pada RenstraDinas Pendidikan KabupatenGroboganTahun 2016-2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Indikator Pencapaian Kinerja Kunci

Langkah yang sangat penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi adalah menetapkan indikator kinerja pencapaian program berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu "situasi yang tidak diharapkan" menuju ke "situasi yang diharapkan". Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui sejumlah indikator. Perubahan ini memerlukan waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat "input" dan "proses" (kegiatan program), perubahan pada tingkat "output" (cakupan program), tingkatan "outcome" dan sampai perubahan lanjut di tingkat "dampak".

Dalam rangka memberikan layanan dasar di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyelenggarakan program-program pembangunan bidang pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati Grobogan, sejalan dengan misi 5K Kemendiknas tentang penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut :

1. Aspek Ketersediaan

Pada jenjang PAUD, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun sebesar 40,30%, dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 61,55%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu APK PAUD usia 4-6 tahun sebesar 40,30% dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 61,79%.

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015

adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A sebesar 106,69%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 97,71% dan APK SMP/MTs/Paket B sebesar 100,05%, APM SMP/MTs/Paket B sebesar 87,10%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu APK SD/MI/Paket A sebesar 106,85%; APM SD/MI/Paket A sebesar 97,83% dan APK SMP/MTs/Paket B sebesar 100,24%; APM SMP/MTs/Paket B sebesar 87,23%.

2. Aspek Keterjangkauan

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,03% dan APS SMP/MTs sebesar 0,01/0,61%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah APS SD/MI sebesar 0% dan APS SMP/MTs sebesar 0%.

3. Aspek Kualitas

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 100%, Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar 100%, dan Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,10/7,05, Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs sebesar 50,58/50,39. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 untuk Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 100%, Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar 100% dan Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,23 Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs sebesar 6,05.

Untuk Prosentase Pendidik yang berkualifikasi S1/D4, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah sebesar 94,36%, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 94,48% untuk semua jenjang pendidikan.

4. Aspek Kesetaraan

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah Ruang Kelas SD/MI kondisinya sebesar 55,69%/60,41% dan Ruang Kelas SMP/MTs kondisinya sebesar 91,42%/64,03. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah Ruang Kelas SD/MI kondisinya sebesar 56,74% dan Ruang Kelas SMP/MTs kondisinya sebesar 91,71%.

5. Aspek Kepastian

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs melaksanakan MBS dengan baik sebesar 99,05%/98,51% sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs melaksanakan MBS dengan baik sebesar 100,00%.

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel 6.1 di bawah ini :

INDIKATOR MAKRO

NO.	URAIAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	6,92	6,93	6,95	6,98	7,01	7,04
2	Angka Harapan Lama Sekolah (thn)	12,35	12,44	12,54	12,63	12,73	12,82

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik PAUD dan pendidikan Dasar	prosentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,58	52,59	53,60	54,61	55,65	55,69
		persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,55	87,59	87,63	87,66	87,69	87,72
		persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,97	92,99	93,03	93,05	93,09	93,13
		prosentase Guru PAUD yang bersertifikasi	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50
		persentase Guru SD yang bersertifikasi	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00
		persentase Guru SMP yang bersertifikasi	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35,00
2	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya pendidikan melalui penataan guru dan penataan sekolah.	Rasio Guru/ Murid SD	19,55	19,58	19,62	19,65	19,68	19,72
		Rasio Guru/ Murid SMP	19,45	19,48	19,52	19,56	19,58	19,63
		Rasio Siswa/ Rombel SD	25,60	25,80	26,00	26,50	27,00	28,00
		Rasio Siswa/ Rombel SMP	22,76	22,78	22,82	22,86	22,89	22,91
3	Meningkatnya jumlah PAUD yang memiliki tata kelola dan citra yang baik	APK PAUD 4-6 Tahun	60,30	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
		Prosentase PAUD terakreditasi	5,08	5,15	5,19	5,22	5,25	5,31
		Prosentase Penduduk usia > 15 tahun	91,89	91,91	91,93	91,95	91,98	91,99

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dan pendidikan Non Formal yang berkualitas	melek huruf						
		persentase PKBM sesuai SPM						
		APK SD/MI	106,65	106,72	106,75	106,79	106,83	106,85
		APK SMP/MTs	100,05	100,09	100,14	100,17	100,21	100,24
		APM SD/MI	97,71	97,73	97,75	97,79	97,81	97,83
		APM SMP/MTs	87,10	87,13	87,15	87,18	87,21	87,23
		Angka Melanjutkan SD/MI	97,88	97,90	97,93	97,95	97,98	98,01
		Angka Melanjutkan SMP/MTs	72,88	72,92	72,95	72,99	73,05	73,08
		APS SD/MI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
		APS SMP/MTs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		Prosentase SD memiliki Ruang Kelas Standar	56,11	56,20	56,25	56,54	56,65	56,74
		Prosentase SMP memiliki Ruang Kelas Standar	91,45	91,48	91,51	91,53	91,55	91,57
		Prosentase SD memiliki Ruang Perpustakaan Standar	50,05	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
		Prosentase SMP memiliki Ruang Perpustakaan Standar	38,00	43,00	48,00	54,00	59,00	62,00

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Prosentase SMP memiliki Ruang Lab IPA Standar	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
		Prosentase SMP memiliki Ruang Lab Komputer Standar	40,00	42,00	46,00	48,00	50,00	52,00
5	Meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran	Rata-Rata Nilai UN/UASBN SD	7,10	7,13	7,15	7,18	7,21	7,23
		Rata-Rata Nilai UN/UASBN SMP	50,58	50,68	50,78	50,89	6,01	6,05
		Angka Kelulusan SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka Kelulusan SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Prosentase SD melaksanakan MBS	87,55	87,59	87,63	87,66	87,69	87,72
		Prosentase SMP melaksanakan MBS	87,55	87,59	87,63	87,66	87,69	87,72

Tabel47: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Daerah

B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran perlu dianalisis dengan baik agar pencapaian kinerja dapat dievaluasi dan perbaikan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Untuk memudahkan pencapaian indikator kinerja kunci, analisis menurut pilar kebijakan departemen Pendidikan Nasional.

Tabel berikut dapat digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kondisi dan Target						
			Ke 0	Ke 1	Ke 2	Ke 3	Ke 4	Ke 5	Ke 6
1	Tersedia dan terjangkau-nya layanan pendidikan PAUD yang bermutu	1.							
		2.							
		3.							
		Dst.							
2	Tersedia dan terjangkau-nya layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu	1.							
		2.							
		3.							
		Dst.							
3	Tersedia dan terjangkau-nya layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu	1.							
		2.							
		3.							
		Dst.							
4	Tersedia dan tercukupi-nya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	1.							
		2.							
		3.							
		Dst.							
5	Tersedianya sistem tata	1.							

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kondisi dan Target						
			Ke 0	Ke 1	Ke 2	Ke 3	Ke 4	Ke 5	Ke 6
	kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan	2.							
		3.							
		Dst.							

Tabel48 : Format Pengukuran Kinerja

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan ini berisi perencanaan tahun 2016-2021. Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Grobogan 2016-2021. sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, Renstra ini mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling banyak melibatkan sumber daya manusia dan menyerap dana yang paling besar di Kabupaten, Dinas Pendidikan dituntut untuk menyusun langkah besar dalam perencanaan yang terprogram, berkesinambungan, komprehensif dan bermutu. Selain itu, implementasi Renstra ini sangat penting agar sasaran yang telah disusun dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, setiap program/kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Grobogan.

Namun demikian, hasil dari suatu program pendidikan biasanya baru dapat dilihat dalam jangka panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu, pemantauan yang terus-menerus dan sinergi antar bidang dalam lingkungan dinas pendidikan dan dengan para pemangku kepentingan pendidikan baik di sekolah, kecamatan maupun masyarakat akan mendorong tercapainya tujuan pendidikan secara lebih cepat dan lebih baik. Koordinasi dan kerjasama yang

berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan pendidikan perlu dilakukan agar terjadi sinergi antara para pengelola, pelaksana dan penerima manfaat pendidikan.

Meskipun persentase dana yang dialokasikan untuk pendidikan sangat besar dibanding OPD lainnya, dana yang dialokasikan relatif sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan yang besar dan kompleks. Karena itu, pengelolaan keuangan yang baik mutlak diperlukan agar dana yang telah dialokasi dibelanjakan secara bijak. Disamping itu, peran serta masyarakat menjadi faktor yang amat penting dalam itu serta memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan pendidikan baik yang berasal dari sumber pemerintah maupun masyarakat.

Renstra Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten Grobogan dan menjadi titik awal dari peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan. Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu:

1. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berkomitmen menjadikan renstra sebagai pedoman dalam menyusun renja setiap tahun, dan tidak ada satupun yang keluar dari apa yang sudah tercantum dalam Renstra tahun 2016-2021;
2. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan akan menjalankan seluruh komitmen dengan mencapai target optimal yang telah ditetapkan di Renstra maupun RPJMD tahun 2016-2021.

3. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sadar dan bertekad memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam renstra yang telah disepakati bersama.
4. Membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian kualitas pendidikan.
5. Memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, yang mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016-2021
 disusun dengan peduh dedikasi mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan
 mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan.
 Capaian kinerja sebagai mana yang
 telah ditetapkan akan menjadi motivasi bekerja dalam mewujudkan pendidikan yang makin bermartabat,
 merata dan berkualitas

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016-2021, mudah-
 mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-
 benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pencapaian visi dan misi Bupati dan
 Wakil Bupati Kabupaten Grobogan

Penyusunan Renstra ini mendapat dukungan yang luar biasa dari para pemangku
 kepnetingan pendidikan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya
 Tim Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang telah mencurahkan tenaga

dan pikiran demi tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan ini.